PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SEKRETARIAT DPRD



HIMPUNAN PROSES PEMBAHASAN PERATURAN DAERAH PROV. SUMBAR

NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : TAHUN 2026

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR SUMATERA BARAT

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) dan Pasal 321 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;

24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;

25. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

26. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berupa laporan keuangan yang memuat:
a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Neraca;
d. Laporan Operasional;
e. Laporan Arus Kas:
f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

a. Pendapatan daerah sebesar Rp.6.207.996.645.654,63 (enam triliun dua ratus tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh empat koma enam puluh tiga rupiah);

b. Belanja daerah sebesar Rp.6.041.051.585.846,25 (enam triliun empat puluh satu miliar lima puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh enam koma dua puluh lima rupiah);

c. Surplus sebesar Rp.166.945.059.808,38 (seratus enam puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh lima juta lima puluh sembilan ribu delapan ratus delapan koma tiga puluh delapan rupiah);

d. Pembiayaan daerah, terdiri atas:

- Penerimaan pembiayaan sebesar Rp.117.722.983.809,12 (seratus tujuh belas miliar tujuh ratus dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan koma dua belas rupiah); dan

- Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

e. Pembiayaan Daerah Netto sebesar Rp.117.722.983.809,12 (seratus tujuh belas miliar tujuh ratus dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan koma dua belas rupiah);

f. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp.284.668.043.617,50 (dua ratus delapan puluh empat miliar enam ratus enam puluh delapan juta empat puluh tiga ribu enam ratus tujuh belas koma lima puluh rupiah).

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar Rp.60.567.337.861,37 (enam puluh miliar lima ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh satu koma tiga puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp.6.268.563.983.516,00 (enam triliun dua ratus enam puluh delapan miliar lima ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam belas rupiah).

2. Realisasi pendapatan sebesar Rp.6.207.996.645.654,63 (enam triliun dua ratus tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh empat koma enam puluh tiga rupiah).

3. Selisih kurang sebesar Rp.60.567.337.861,37 (enam puluh miliar lima ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh satu koma tiga puluh tujuh rupiah).

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sebesar Rp.345.247.351.665,18 (tiga ratus empat puluh lima miliar dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus enam puluh lima koma delapan belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp6.386.298.937.511,43 (enam triliun tiga ratus delapan puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus sebelas koma empat puluh tiga rupiah).

2. Realisasi belanja sebesar Rp.6.041.051.585.846,25 (enam triliun empat puluh satu miliar lima puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh enam koma dua puluh lima rupiah).

3. Selisih kurang sebesar Rp.345.247.351.665,18 (tiga ratus empat puluh lima miliar dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus enam puluh lima koma delapan belas rupiah).

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sebesar Rp.284.680.013.803,81 (dua ratus delapan puluh empat miliar enam ratus delapan puluh juta tiga belas ribu delapan ratus tiga koma delapan puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
   1. Defisit setelah perubahan sebesar Rp.117.734.953.995,43 (seratus tujuh belas miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima koma empat puluh tiga rupiah).
   2. Realisasi surplus sebesar Rp.166.945.059.808,38 (seratus enam puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh lima juta lima puluh sembilan ribu delapan ratus delapan koma tiga puluh delapan rupiah).
   3. Selisih lebih sebesar Rp.284.680.013.803,81 (dua ratus delapan puluh empat miliar enam ratus delapan puluh juta tiga belas ribu delapan ratus tiga koma delapan puluh satu rupiah).

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp.11.970.186,31 (sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu seratus delapan puluh enam koma tiga puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
   1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp.117.734.953.995,43 (seratus tujuh belas miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima koma empat puluh tiga rupiah).
   2. Realisasi sebesar Rp.117.722.983.809,12 (seratus tujuh belas miliar tujuh ratus dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan koma dua belas rupiah).
   3. Selisih kurang sebesar Rp.11.970.186,31 (sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu seratus delapan puluh enam koma tiga puluh satu rupiah).

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
   1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp.0,00 (nol rupiah).
   2. Realisasi sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
   3. Selisih sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp.11.970.186,31 (sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu seratus delapan puluh enam koma tiga puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

   1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan sebesar Rp117.734.953.995,43 (seratus tujuh belas milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima koma empat puluh tiga rupiah).

   2. Realisasi sebesar Rp.117.722.983.809,12 (seratus tujuh belas miliar tujuh ratus dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan koma dua belas rupiah).

   3. Selisih kurang sebesar Rp.11.970.186,31 (sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu seratus delapan puluh enam koma tiga puluh satu rupiah).

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp.117.734.953.995,43 (seratus tujuh belas miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima koma empat puluh tiga rupiah).

b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Sebagai Penerimaan Pembiayaan Berjalan sebesar Rp.117.722.983.809,12 (seratus tujuh belas miliar tujuh ratus dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan koma dua belas rupiah).

c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp.284.668.043.617,50 (dua ratus delapan puluh empat miliar enam ratus enam puluh delapan juta empat puluh tiga ribu enam ratus tujuh belas koma lima puluh rupiah).

d. Koreksi kurang Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya sebesar Rp.11.970.186,31 (sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu seratus delapan puluh enam koma tiga puluh satu rupiah).

e. Lain-lain sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

f. Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp.284.668.043.617,50 (dua ratus delapan puluh empat miliar enam ratus enam puluh delapan juta empat puluh tiga ribu enam ratus tujuh belas koma lima puluh rupiah).

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

a. Jumlah aset sebesar Rp.12.849.669.192.812,30 (dua belas triliun delapan ratus empat puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh sembilan juta seratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus dua belas koma tiga puluh rupiah).

b. Jumlah kewajiban sebesar Rp.480.630.333.623,12 (empat ratus delapan puluh miliar enam ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus dua puluh tiga koma dua belas rupiah).

c. Jumlah ekuitas sebesar Rp.12.369.038.859.189,18 (dua belas triliun tiga ratus enam puluh sembilan miliar tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh sembilan koma delapan belas rupiah).

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah Operasional sebesar Rp.6.594.712.583.990,79 (enam triliun lima ratus sembilan puluh empat miliar tujuh ratus dua belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh koma tujuh puluh sembilan rupiah).

b. Beban Daerah sebesar Rp.5.842.576.179.824,29 (lima triliun delapan ratus empat puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat koma dua puluh sembilan rupiah).

c. Surplus Operasional sebesar Rp.752.136.404.166,50 (tujuh ratus lima puluh dua miliar seratus tiga puluh enam juta empat ratus empat ribu seratus enam puluh enam koma lima puluh rupiah).

d. Defisit Non Operasional sebesar Rp.16.330.444.491,69 (enam belas miliar tiga ratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh satu koma enam puluh sembilan rupiah).

e. Surplus Laporan Operasional sebesar Rp.735.805.959.674,81 (tujuh ratus tiga puluh lima miliar delapan ratus lima juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh empat koma delapan puluh satu rupiah).

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

a. Saldo Awal Kas Daerah per 1 Januari 2025 sebesar Rp.117.734.953.995,43 (seratus tujuh belas milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima koma empat puluh tiga rupiah).

b. Arus Kas Dari Aktifitas Operasi sebesar Rp.886.339.427.244,51 (delapan ratus delapan puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh empat koma lima puluh satu rupiah).

c. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan defisit sebesar Rp.719.394.367.436,13 (tujuh ratus sembilan belas miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh enam koma tiga belas rupiah).

d. Arus Kas Dari Aktivitas Non Anggaran sebesar Rp.5.388.537,69 (lima juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh koma enam puluh sembilan rupiah).

e. Saldo Kas Daerah Akhir per 31 Desember 2025 sebesar Rp.284.685.402.341,50 (dua ratus delapan puluh empat miliar enam ratus delapan puluh lima juta empat ratus dua ribu tiga ratus empat puluh satu koma lima puluh rupiah).

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal sebesar Rp.11.796.950.964.552,20 (sebelas triliun tujuh ratus sembilan puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus lima puluh dua koma dua puluh rupiah).

b. Surplus Laporan Operasional sebesar Rp.735.805.959.674,81 (tujuh ratus tiga puluh lima miliar delapan ratus lima juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh empat koma delapan puluh satu rupiah).

c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar berkurang sebesar Rp.163.718.065.037,85 (seratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus delapan belas juta enam puluh lima ribu tiga puluh tujuh koma delapan puluh lima rupiah).

d. Ekuitas Akhir sebesar Rp.12.369.038.859.189,20 (dua belas triliun tiga ratus enam puluh sembilan miliar tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh sembilan koma dua puluh rupiah).

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g untuk Tahun Anggaran 2025 memuat informasi secara kuantitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

a.	Lampiran I.1	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2025;
	Lampiran I.2	Ringkasan APBD Yang Diklasikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
	Lampiran I.3	Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
	Lampiran I.4	Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2025;
b.	Lampiran II	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2025;
c.	Lampiran III	Laporan Operasional Per 31 Desember 2025;
d.	Lampiran IV	Laporan Perubahan Ekuitas Per 31 Desember 2025;
e.	Lampiran V	Neraca Per 31 Desember 2025;
f.	Lampiran VI	Laporan Arus Kas Per 31 Desember 2025;
g.	Lampiran VII	Catatan atas Laporan Keuangan (Pada Buku Lap. Keuangan);

h.	Lampiran VIII	Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah Tahun Anggaran 2025;
i.	Lampiran IX	Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tahun Anggaran 2025;
j.	Lampiran X	Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihannya Tahun Anggaran 2025;
k.	Lampiran XI	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025;
l.	Lampiran XII	Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Tahun Anggaran 2025;
m.	Lampiran XIII	Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Tahun Anggaran 2025;
n.	Lampiran XIV	Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2025;
o.	Lampiran XV	Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2025;
p.	Lampiran XVI	Daftar Dana Cadangan Daerah Per 31 Desember 2025;
q.	Lampiran XVII	Daftar Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2025;
r.	Lampiran XVIII	Daftar Kewajiban Jangka Panjang Per 31 Desember 2025;
s.	Lampiran XIX	Daftar Sub Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2025 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
t.	Lampiran XX-1	Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah Tahun 2025;
u.	Lampiran XX-2	Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Rugi Labaa) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah Tahun 2025;

Pasal 11

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ARRY YUSWANDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2026 NOMOR :
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 :

NOTA PENGANTAR

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOTA PENGANTAR

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOTA PENGANTAR
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yth.Sdr. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat;

Yth.Sdr. Rekan-rekan Anggota Forkopimda, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama;

Yth.Sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Kepala Dinas/Badan/Biro lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

Yth.Sdr. Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, Rekan-Rekan Pers Media Cetak dan Elektronik serta hadirin yang berbahagia;

Mengawali penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 ini, perkenankanlah kami mengajak Saudara-saudara untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayah-NYA sehingga kita masih diberi kekuatan dan kesehatan dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara serta masyarakat.

Shalawat beriring salam disampaikan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah memberikan tuntunan bagi umat manusia untuk keselamatan, kehidupan baik di dunia maupun di akhirat.

Selanjutnya ijinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan beserta seluruh anggota DPRD Prov Sumbar, yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk menyampaikan penjelasan tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang merupakan pertanggungjawaban dari pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang pada dasarnya merupakan wujud kristalisasi aspirasi daerah yang disusun dan diputuskan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD yang dilakukan secara transparan. Sebagai anggaran publik yang sifatnya terbuka maka setiap akhir tahun anggaran, pemerintah daerah mempunyai kewajiban konstitusional menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 yang dituangkan pada pasal 320 ayat (1) yang berbunyi "Kepala daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir".

Saudara Pimpinan, Anggota DPRD serta hadirin yang terhormat,

Sebagai penjabaran dari ketentuan tersebut diatas, maka penyajian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 disajikan dalam 6 (enam) jenis buku yang terdiri dari :

1. Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025;
3. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025.
4. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025;
5. Laporan Kinerja & Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD Tahun Anggaran 2025
6. Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Dengan disampaikannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025 ini mudah-mudahan akan dapat memberikan informasi yang memadai tentang segala kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, terutama dalam mengelola keuangan daerah selama tahun anggaran yang lalu, disamping itu lebih jauh lagi dapat diketahui sampai sejauh mana Pemerintah Daerah telah menggunakan dan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan daerah baik yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun yang dipungut dari masyarakat berupa pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Saudara Pimpinan dan anggota DPRD serta hadirin yang terhormat.

APBD sebagai rencana operasional keuangan daerah mempunyai siklus/tahapan yang dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Oleh karena itu pada kesempatan ini sebelum menjelaskan tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025, akan disampaikan sepintas tentang gambaran pada saat penyusunan dan pelaksanaan APBD tahun 2025 yang lalu.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah;
2. Fungsi APBD antara lain yakni otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi; dan
3. Prinsip-prinsip penganggaran diantaranya terkait dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Selanjutnya dalam kedua peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa dalam penyusunan APBD didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
4. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari RPJM-D tahun 2021-2026, maka ditetapkan prioritas pembangunan daerah, yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil, dan Berdaya Saing
2. Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK);
3. Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan;
4. Meningkatkan Usaha perdagangan dan Industri Kecil/Menengah serta Ekonomi Berbasis Digital;
5. Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Daya Saing Kepariwisataan;
6. Meningkatkan Pembangunan Infratrukstur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan;
7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas

Dari dokumen tersebut diatas, yang kemudian dijabarkan lagi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah yaitu Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan APBD Tahun 2025 sesuai dengan Nota Kesepakatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 120-168/GSB-2025, Nomor 120-07-2025 dan Prioritas dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2025 dengan Nota Kesepakatan Nomor 120-169/GSB-2025, Nomor 120-08-2025, sebagai pedoman dalam penyusunan APBD 2025.

Saudara Pimpinan dan anggota DPRD serta hadirin yang terhormat.

Sebelum menguraikan realisasi APBD tahun 2025, maka perlu terlebih dahulu disampaikan besarnya jumlah APBD tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagai berikut :

NO.REK	U R A I A N	ANGGARAN
4.	**PENDAPATAN**	**6.268.563.983.516,00**
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.807.443.163.516,00
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	3.418.953.623.000,00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	42.167.197.000,00
5.	**BELANJA**	**6.386.298.937.511,43**
5.1.	BELANJA OPERASI	4.677.715.033.301,66
5.2.	BELANJA MODAL	777.207.295.841,28
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	9.000.997.000,00
5.4.	BELANJA TRANSFER	922.375.611.368,49
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(117.734.953.995,43)**
6.	**PEMBIAYAAN**	**117.734.953.995,43**
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	117.734.953.995,43
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	-
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**0,00**

Penyusunan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ini pada dasarnya adalah merupakan realisasi keuangan secara riil dari pelaksanaan pokok-pokok kebijaksanaan dan program kerja yang telah dituangkan dalam APBD Tahun 2025, oleh sebab itu laporan realisasinya memuat seluruh realisasi penerimaan dan pengeluaran yang telah dipertanggungjawabkan oleh masing-masing unit-unit kerja, lembaga/dinas pemakai anggaran dalam tahun yang bersangkutan.

Bertitik tolak dari ketentuan tersebut, maka realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD dalam tahun anggaran bersangkutan akan dapat diketahui berikut dengan sisa kas dan sisa perhitungan pada akhir tahun anggaran.

Untuk lebih jelasnya realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah tahun 2025 tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut :

A. PENDAPATAN.

Kebijakan pendapatan daerah pada Tahun 2025 ditujukan pada upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kebijakan sbb :

Terkait dengan kebijakan tersebut maka dalam Tahun 2021-2026 strategi dalam upaya peningkatan kapasitas fiskal dalam upaya peningkatan pendapatan daerah adalah :

1. Mengoptimalkan kinerja Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) melalui:
   a. Mengembangkan pelaksanaan *Payment Point System* bekerjasama dengan Bank Nagari, dan Bank Pemerintah lainnya pada seluruh kantor SAMSAT di Sumatera Barat dalam rangka Peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak.
   b. Mengoperasikan Kantor SAMSAT di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kantor SAMSAT Nagari di seluruh Kabupaten yang mempunyai wilayah jauh dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada pemilik kendaraan bermotor atau wajib pajak dalam membayarkan pajaknya.
   c. Mengoperasikan Mobil Pelayanan SAMSAT Keliling untuk menjangkau pelayanan Pembayaran PKB/BBNKB ke daerah yang jaraknya jauh dari Kantor SAMSAT.
   d. Melakukan pembebasan Denda PKB/BBNKB untuk periode waktu tertentu.
   e. Melakukan pembebasan BBNKB II bagi Kendaraan Bermotor luar Provinsi Sumatera Barat untuk periode waktu tertentu.
   f. Melaksanakan Razia Terpadu PKB/BBNKB secara rutin dan berkesinambungan.
   g. Meningkatkan koordinasi dengan Tim Pembina SAMSAT Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Dit Lantas Polda Sumatera Barat dan PT. Jasa Raharja dan melibatkan PT. Bank Nagari, dalam rangka kelancaran urusan pelayanan kepada masyarakat pada seluruh kantor SAMSAT se Provinsi Sumatera Barat.
   h. Meningkatkan kinerja pelayanan pada kantor UPT/SAMSAT dengan melakukan pemeliharaan dan perbaikan kantor UPT-UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat secara berkala dan bertahap dan melengkapi seluruh peralatan sistem pelayanan baik pelayanan *online* maupun pelayanan yang dilakukan secara *offline.*
   i. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis kepada petugas terkait tentang tugas pelayanan dilapangan.
   j. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian secara rutin dan langsung terhadap semua tugas pada semua UPT.
   k. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka inventarisasi aset kendaraan bermotor yang menjadi Objek Pajaknya.
   l. Meningkatkan kualitas pemutakhiran data objek Pajak Kendaraan Bermotor melalui status objek pajak.
   m. Melaksanakan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan tugas-tugas dengan seluruh kepala UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
   n. Melakukan pendataan potensi, evaluasi penerimaan dan melakukan kajian dalam upaya memprediksi kondisi ekonomi tahun berikutnya untuk menghitung penetapan target APBD tahun anggaran berikutnya.
2. Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu dengan mengimplementasi Teknologi Informasi pada seluruh OPD Dinas/Instansi pengelola pelayanan Retribusi serta menjaring potensi-potensi baru yang selama ini belum terpungut.
3. Meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan pada kantor OPD Dinas/Instansi pelayanan Retribusi dengan melengkapi sarana dan prasarana pelayanan, melakukan pemeliharaan dan perbaikan kantor secara berkala, dan bertahap dan melengkapi seluruh peralatan sistem pelayanan.

4. Meningkatkan pelaksanaan *Good Coorporate Governance* (GCG) pada semua BUMD sehingga dapat memberikan peningkatan jumlah deviden kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
5. Mengoptimalkan aset-aset pemerintah daerah yg masih *idle* dan berpotensi sebagai sumber penerimaan dengan cara kerjasama pemanfaatan dengan pihak lain sehingga memberikan konstribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.
6. Meningkatkan kinerja dan pelayanan seluruh OPD Dinas/Instansi yang berkaitan dengan penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terutama OPD Dinas/Instansi Pengelola BLUD, Pengelola Keuangan dan Kas Daerah, Pengelola Pelayanan Persampahan, Pengelola Pendidikan dan Pelatihan, Pengelola Pertanian dan Peternakan dan lain-lain sehingga dapat meningkatan penerimaan dan berkonstribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
7. Meningkatkan koordinasi, konfirmasi dan rekonsiliasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan penerimaan dari Dana Bagi Hasil.
8. Meningkatkan koordinasi dan konfirmasi dengan Pemerintah Pusat dan Pihak Swasta dalam rangka peningkatan penerimaan DID, IPDMIP, PHJD, Hibah dan lainnya serta sumbangan Pihak Ketiga.

Pada Tahun 2025, pendapatan daerah yang dianggarkan sebesar Rp6.268.563.983.516,00 sampai akhir tahun anggaran terealisir sebesar Rp6.207.996.645.654,63 atau sebesar 99,03%, kurang dari target yang ditetapkan sebesar Rp 60.567.337.861,37.

Secara rinci capaian perolehan pendapatan tahun 2025 jika dibandingkan dengan anggaran dapat digambarkan sebagai berikut :

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH.

Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan sebesar Rp2.807.443.163.516,00 dapat direalisir sebesar Rp2.763.868.829.028,63 atau sebesar 88,03% terdapat kekurangan capaian target sebesar Rp43.574.334.487,37 yang terdiri dari :

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Lebih(Kurang)
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**2.807.443.163.516,00**	**2.763.868.829.028,63**	**98,45**	**(43.574.334.487,37)**
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	2.118.471.018.085,00	2.056.281.596.209,75	97,06	(62.189.421.875,25)
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	386.624.597.307,00	440.086.409.242,62	113,83	53.461.811.935,62
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	139.682.145.880,00	126.838.893.909,00	90,81	(12.843.251.971,00)
4.1.04	Lain- Lain PAD Yang Sah	162.665.402.244,00	140.661.929.667,26	94,98	(22.003.472.576,74)

2. PENDAPATAN TRANSFER.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, penganggaran pendapatan transfer selain bertujuan untuk memberikan kepastian sumber pendanaan

bagi APBD, juga mengurangi atau memperkecil kesenjangan fiskal antar daerah. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat ini direncanakan sebesar Rp3.418.953.623.000,00 dan terealisir sebesar Rp3.405.275.915.726,00 atau 99.60%, kurang dari target ditetapkan sebesar Rp13.677.707.274,00 yang terdiri dari :

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Lebih(Kurang)
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**3.418.953.623.000,00**	**3.405.275.915.726,00**	**99,60**	**(13.677.707.274,00)**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.380.007.413.000,00	3.365.500.418.626,00	99,57	(14.506.994.374,00)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	38.946.210.000,00	39.775.497.100,00	102,13	829.287.100,00

3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH.

Lain–lain Pendapatan Yang Sah dianggarkan sebesar Rp42.167.197.000,00 dapat direalisir sebesar Rp38.851.900.900,00 atau 92,14% dan terdapat kekurangan capaian target sebesar Rp3.315.296.100,00 yang terdiri dari :

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Lebih(Kurang)
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SYAH**	**42.167.197.000,00**	**38.851.900.900,00**	**92,14**	**(3.315.296.100,00)**
4.3.01	Pendapatan Hibah	22.167.197.000,00	18.851.900.900,00	85,04	(3.315.296.100,00)
4.3.02	Dana Darurat	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00	-

B. BELANJA.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pemerintah Daerah dalam menentukan kebijakan pengalokasian belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Kebijakan belanja diprioritaskan berdasarkan urusan pemerintah daerah digunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi untuk membiayai program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah sesuai yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu serta pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Selanjutnya dalam pasal 55 dan 56 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Sampai akhir tahun anggaran 2025, anggaran belanja daerah yang disediakan sebesar Rp6.386.298.937.511,43 dan terealisir sebesar Rp6.041.051.585.846,25 atau 94,59%, dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp345.247.351.665,18 terdiri dari :

1. Belanja Operasi

Sampai akhir tahun anggaran pada Belanja Operasi terealisir sebesar Rp4.392.082.462.719,12 atau 93,89% dari anggaran sebesar Rp4.677.715.033.301,66 yang terdiri dari :

a. **Belanja Pegawai**

Merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji, tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diperuntukkan untuk Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Tambahan Penghasilan ASN, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH dan Belanja Pegawai BLUD.

Sampai akhir tahun anggaran pada belanja pegawai terealisir sebesar Rp2.597.123.147.451,76 atau 93,61% dari anggaran sebesar Rp2.774.495.521.943,00 dengan uraian sebagai berikut :

kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
5.1.	BELANJA OPERASI				
5.1.01.	Belanja Pegawai	2.774.495.521.943,00	2.597.123.147.451,76	93,61	177.372.374.491,24
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.509.050.327.691,00	1.477.853.716.524,00	97,93	31.196.611.167,00
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.218.164.350.232,00	1.072.479.601.786,76	88,04	145.684.748.445,24
5.1.01.04.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	41.091.992.400,00	41.037.673.927,00	99,87	54.318.473,00
5.1.01.05.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.692.199.375,00	1.255.502.969,00	74,19	436.696.406,00
5.1.01.06.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	4.496.652.245,00	4.496.652.245,00	100,00	0,00
5.1.01.99.	Belanja Pegawai BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00

b. **Belanja Barang dan Jasa**

Kebijakan pengalokasian Belanja Barang dan Jasa diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib (yang terkait dengan pelayanan dasar dan tidak terkait Pelayanan Dasar) dan urusan pemerintahan yang mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, dan unsur pemerintahan umum, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Belanja barang dan jasa merupakan belanja dalam bentuk Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, Belanja Barang dan Jasa BOS dan Belanja Barang dan Jasa BLUD.

Belanja Barang dan Jasa dialokasikan sebesar Rp1.740.825.071.754,66 dengan realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp1.641.154.733.941,36 atau sebesar 94,27%, dengan uraian sebagai berikut :

kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
5.1.	BELANJA OPERASI				
5.1.02.	**Belanja Barang dan Jasa**	**1.740.825.071.754,66**	**1.641.154.733.941,36**	**94,27**	**99.670.337.813,30**
5.1.02.01.	Belanja Barang	280.106.743.105,43	250.203.695.270,00	89,32	29.903.047.835,43
5.1.02.02.	Belanja Jasa	555.330.837.328,43	524.072.020.873,28	94,37	31.258.816.455,15
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	81.321.342.538,80	70.678.533.167,53	86,91	10.642.809.371,27
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	126.519.771.696,00	113.174.311.666,00	89,45	13.345.460.030,00
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	22.355.403.000,00	20.568.632.215,00	92,01	1.786.770.785,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOSP	257.995.024.846,00	256.996.654.448,00	99,61	998.370.398,00
5.1.02.99.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	417.195.949.240,00	405.460.886.301,55	97,19	11.735.062.938,45

c. **Belanja Subsidi**

Belanja subsidi direncanakan untuk pemberian subsidi bunga pinjaman yang ditujukan kepada pelaku usaha mikro yang disalurkan melalui kerja sama Bank Nagari dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat atau Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Dalam hal ini, Bank Nagari akan menyalurkan pinjaman modal kerja dengan pola subsidi bunga/margin/imbal jasa yang berasal dari belanja subsidi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Belanja subsidi yang dianggarkan pada Perubahan APBD TA 2025 sebesar Rp1.125.000.000,00 ini terealisasi 99,95%, yang digunakan untuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga/Margin kepada Usaha Kecil, dengan jumlah usaha kecil yang dapat difasilitasi subsidi sebanyak 128 UKM yang menyebar pada 19 Kab/Kota se-Sumatera Barat

d. **Hibah**

Belanja hibah pada tahun 2025 dialokasikan untuk :

1. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat yaitu kepada Lantamal.
2. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia yaitu Persatuan Wredata Republik Indonesia, Palang Merah Indonesia, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kab/Kota, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, KONI, Kwarda Pramuka, Masjid, Mushala, Majlis Ta'lim, Panti Rehabilitasi Sosial, Panti Asuhan, dan lainnya
3. Belanja Hibah Dana BOS yaitu kepada Satdikmen Swasta dan Satdiksus Swasta.
4. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Pada Tahun 2025 Belanja Hibah yang dilakokasi sebesar Rp161.269.439.604,00 dengan realisasi sebesar Rp152.680.139.286,00 atau sebesar 94,67% dengan uraian sebagai berikut :

kode Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
5.1.05.	**BELANJA HIBAH**	**161.269.439.604,00**	**152.680.139.286,00**	**94,67**	**8.589.300.318,00**
5.1.05.01.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	80.075.550.404,00	74.506.481.703,00	93,05	5.569.068.701,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	76.883.010.000,00	74.862.778.383,00	97,37	2.020.231.617,00
5.1.05.07.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.310.879.200,00	3.310.879.200,00	100,00	0,00

e. **Belanja Bantuan Sosial**

Pada Tahun 2025 tidak ada penganggaran untuk belanja bantuan sosial.

2. Belanja Modal

Belanja Modal diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib (yang terkait dengan pelayanan dasar dan tidak terkait pelayanan dasar) dan urusan pemerintahan yang mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, dan unsur pemerintahan umum, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Anggaran dan realisasi belanja modal terdiri atas:

kode Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
5.2.	**BELANJA MODAL**	**777.207.295.841,28**	**719.602.262.636,13**	**92,59**	**57.605.033.205,15**
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	14.782.202.021,00	10.756.157.250,00	72,76	4.026.044.771,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	209.302.203.702,00	193.855.260.182,00	92,62	15.446.943.520,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	136.131.470.396,47	117.106.166.907,13	86,02	19.025.303.489,34
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	354.825.037.644,81	337.550.339.068,00	95,13	17.274.698.576,81
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	62.166.382.077,00	60.334.339.229,00	97,05	1.832.042.848,00

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan sebesar Rp9.000.997.000,00 sampai akhir tahun anggaran terealisasi sebesar Rp7.122.821.563,00 atau sebesar 79,13% dari target yang ditetapkan dan bersisa sebesar Rp1.878.175.437,00

4. Belanja Transfer

Belanja Transfer yang dianggarkan sebesar Rp922.375.611.368,49 sampai akhir tahun anggaran terealisir sebesar Rp922.244.038.928,00 atau 99,99%, terdiri atas:

kode Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
5.4.	**BELANJA TRANSFER**	**922.375.611.368,49**	**922.244.038.928,00**	**99,99**	**131.572.440,49**
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	866.806.142.668,49	866.806.142.668,49	100,00	0,00
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	55.569.468.700,00	55.437.896.260,00	99,76	131.572.440,00

C. PEMBIAYAAN.

Berdasarkan uraian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2025, APBD Provinsi Sumatera Barat mengalami defisit sebesar Rp117.734.953.995,43 dan direncanakan akan ditutup melalui pembiayaan netto sebesar Rp117.734.953.995,43 dan realisasi pembiayaan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No	U R A I A N	ANGGARAN	REALISASI	%	Lebih(Kurang)
	SURPLUS/DEFISIT	**(117.734.953.995,43)**	**166.945.059.808,38**	**141,80**	**284.680.013.803,81**
I	**PEMBIAYAAN**	**117.734.953.995,43**	**117.722.983.809,12**	**99,99**	**(11.970.186,31)**
A	**Penerimaan Pembiayaan**	**117.734.953.995,43**	**117.722.983.809,12**	**99,99**	**(11.970.186,31)**
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	117.734.953.995,43	117.722.983.809,12	99,99	**(11.970.186,31)**
B	**Pengeluaran Pembiayaan**	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	-
II	**Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)**	-	**284.668.043.617,50**	-	**284.668.043.617,50**

Sampai akhir tahun anggaran, realisasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2025 terdapat SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebesar Rp284.668.043.617,50 yang terdiri dari :

a.	Kekurangan realisasi pendapatan daerah	Rp	(60.567.337.861,37)
b.	Sisa dari belanja daerah	Rp	345.247.351.665,18
c.	Sisa Lebih Pembiayaan Netto	Rp	(11.970.186,31)
d.	**SiLPA Tahun 2025**	**Rp**	**284.668.043.617,50**

Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD yang terhormat, serta hadirin yang berbahagia.

Dalam APBD alokasi dana yang digunakan untuk urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib (yang terkait dengan pelayanan dasar dan tidak terkait Pelayanan Dasar) dan urusan pemerintahan yang mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, dan unsur pemerintahan umum.

Untuk menunjang kelancaran tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut :

A. URUSAN WAJIB

1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Urusan Pendidikan

Pada Urusan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp2.602.371.983.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.421.813.555.296,76 atau 93,06% yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pendidikan yang melaksanakan 5 program, 15 kegiatan dan 108 sub kegiatan.

Urusan Kesehatan

Pada Urusan ini mendapat alokasi dana sebesar 871.957.222.564,00 dengan realisasi sebesar Rp839.612.714.675,92 atau 96,29% yang dilaksanakan oleh 5 SKPD dengan rincian sebagai berikut :

No	SKPD	Anggaran	Realisasi	%	Jml Program	Jml Kegiatan	Jml Sub Kegiatan
1	DINAS KESEHATAN	225.889.959.774,00	216.680.112.247,00	95,92	4	17	60
2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	276.789.287.317,00	262.556.972.568,55	94,86	2	3	3
3	RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB SAANIN	67.366.819.700,00	66.247.722.729,00	98,34	1	2	2
4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR	181.328.396.258,00	177.297.011.848,00	97,78	2	3	3
5	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. H. MUHAMMAD YAMIN, SH	120.582.759.515,00	116.830.895.283,37	96,89	2	3	3

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pada Urusan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp467.345.220.324,97 dengan realisasi sebesar Rp435.320.793.343,28 atau 93,15% yang dilaksanakan oleh 2 SKPD dengan rincian sebagai berikut :

No	SKPD	Anggaran	Realisasi	%	Jml Program	Jml Kegiatan	Jml Sub Kegiatan
1	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	345.271.529.767,97	326.785.163.129,00	94,65	8	18	65
2	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	122.073.690.557,00	108.535.630.214,28	88,91	3	12	63

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pada Urusan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp122.252.900.188,00 dengan realisasi sebesar Rp117.246.442.073,76 atau 95,90%. Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan 4 program, 12 kegiatan dan 25 sub kegiatan.

Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Pada Urusan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp31.802.669.746,00 dengan realisasi sebesar Rp29.137.567.935,00 atau 91,62% yang dilaksanakan oleh 2 SKPD dengan rincian sebagai berikut :

No	SKPD	Anggaran	Realisasi	%	Jml Program	Jml Kegiatan	Jml Sub Kegiatan
1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	16.227.784.531,00	15.893.175.237,00	97,94	3	12	30
2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	15.574.885.215,00	13.244.392.698,00	85,04	2	11	35

Urusan Sosial

Pada Urusan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp91.592.403.070,00 dengan realisasi sebesar Rp80.742.937.849,00 atau 88,15%. yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan 6 program, 19 kegiatan dan 82 sub kegiatan.

2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Urusan Tenaga Kerja

Pada Urusan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp30.784.230.383,00 dengan realisasi sebesar Rp30.545.842.147,00 atau 99,23%. Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan 6 program, 16 kegiatan dan 37 sub kegiatan.

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pada Urusan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp16.601.736.967,00 dengan realisasi sebesar Rp15.808.578.064,00 atau 95,22%. Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan 7 program, 20 kegiatan dan 48 sub kegiatan.

Urusan Pangan

Pada Urusan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp21.808.505.910,27 dengan realisasi sebesar Rp20.724.075.989,00 atau 95,03%. Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pangan dengan 4 program, 15 kegiatan dan 44 sub kegiatan.

Urusan Pertanahan

Pada Urusan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp13.420.000,00 dengan realisasi sebesar Rp13.294.000,00 atau 99,06%. Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan 5 program, 5 kegiatan dan 6 sub kegiatan.

Urusan Lingkungan Hidup

Pada Urusan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp24.013.165.999,00 dengan realisasi sebesar Rp21.292.543.500,75 atau 88,67%. Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan 9 program, 19 kegiatan dan 46 sub kegiatan.

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pada urusan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp7.507.164.317,00 dengan realisasi sebesar Rp7.381.683.022,00 atau 98,33%. Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan 5 program, 17 kegiatan dan 45 sub kegiatan.

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pada urusan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp12.632.523.562,00 dengan realisasi sebesar Rp11.789.536.313,00 atau 93,33% yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan 4 program, 10 kegiatan dan 29 sub kegiatan.

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pada urusan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp1.238.680.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.093.805.400,00 atau 88,30%. Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan 3 program, 4 kegiatan dan 8 subkegiatan.

Urusan Perhubungan

Pada Urusan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp17.047.400.091,00 dengan realisasi sebesar Rp16.482.352.107,00 atau 96,69%. Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan 4 program, 21 kegiatan dan 39 sub kegiatan.

Urusan Komunikasi dan Informatika

Pada Urusan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp29.699.848.465,00 dengan realisasi sebesar Rp27.663.936.637,00 atau 93,15%. Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan 3 program, 11 kegiatan dan 32 subkegiatan.

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pada urusan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp24.148.794.174,00 dengan realisasi sebesar Rp22.725.057.468,00 atau 94,10%. Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan 6 program 11 kegiatan dan 26 sub kegiatan.

Urusan Penanaman Modal

Pada Urusan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp12.265.211.251,00 dengan realisasi sebesar Rp11.841.944.495,00 atau 96,55%. Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Provinsi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan 6 program, 13 kegiatan dan 30 sub kegiatan.

Urusan Pemuda dan Olahraga

Pada Urusan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp 55.265.702.668,00 dengan realisasi sebesar Rp54.002.566.556,00 atau 97,71%. Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga dengan 4 program, 16 kegiatan dan 43 sub kegiatan.

Urusan Statistik

Pada Urusan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp73.539.000,00 dengan realisasi sebesar Rp63.419.000,00 atau 86,24%. Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan 1 Program 1 kegiatan dan 5 sub kegiatan.

Urusan Persandian

Pada Urusan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp48.340.000,00 dengan realisasi sebesar Rp26.850.000,00 atau 55,54%. Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statitistik dengan 1 Program 2 kegiatan dan 5 sub kegiatan.

Urusan Kebudayaan

Pada Urusan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp28.752.392.047,00 dengan realisasi sebesar Rp27.656.149.430,78 atau 96,19% yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas kebudayaan dengan 6 program, 15 kegiatan dan 30 sub kegiatan.

Urusan Perpustakaan

Pada Urusan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp1.411.352.900,00 dengan realisasi sebesar Rp1.375.084.126,00 atau 97,43%. Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan 2 program, 5 kegiatan dan 18 sub kegiatan.

Urusan Kearsipan

Pada Urusan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp14.217.059.092,00 dengan realisasi sebesar Rp13.876.391.765,00 atau 97,60%. Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan 3 program, 13 kegiatan dan 35 sub kegiatan.

B. URUSAN PILIHAN

Urusan Kelautan dan Perikanan

Pada urusan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp44.465.935.898,00 dengan realisasi sebesar Rp42.438.641.156,00 atau 95,44%. Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dengan 6 program, 16 kegiatan dan 33 sub kegiatan.

Urusan Pariwisata

Pada Urusan ini dialokasikan dana sebesar Rp20.599.856.032,00 dengan realisasi sebesar Rp17.763.821.128,00 atau 86,23%. Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dengan 5 program, 12 kegiatan dan 30 sub kegiatan.

Urusan Pertanian

Pada Urusan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp206.694.921.973,00 dengan realisasi sebesar Rp189.502.412.285,00 atau 91,68% yang dilaksanakan oleh 2 SKPD dengan rincian sebagai berikut :

No	SKPD	Anggaran	Realisasi	%	Jml Program	Jml Kegiatan	Jlh Sub kegiatan
1	DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	156.239.921.294,00	143.531.617.233,00	91,87	6	15	36
2	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	50.455.000.679,00	45.970.795.052,00	91,11	6	20	39

Urusan Kehutanan

Pada Urusan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp68.489.000.196,00 dengan realisasi sebesar Rp65.422.600.636,00 atau 95,52%. Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dengan 5 program, 13 kegiatan dan 29 sub kegiatan.

Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

Pada Urusan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp14.153.650.078,00 dengan realisasi sebesar Rp13.750.510.694,00 atau 97,15%. Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral dengan 5 program, 9 kegiatan dan 16 sub kegiatan.

Urusan Perdagangan

Pada Urusan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp22.105.023.703,00 dengan realisasi sebesar Rp20.657.282.850,00 atau 93,45%. Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan 3 program, 11 kegiatan dan 25 sub kegiatan.

Urusan Perindustrian

Pada Urusan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp5.064.595.243,00 dengan realisasi sebesar Rp4.730.483.826,00 atau 93,40%. Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan 3 program, 3 kegiatan dan 4 sub kegiatan.

Urusan Transmigrasi

Pada Urusan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp57.661.970,00 dengan realisasi sebesar Rp57.336.240,00 atau 99,44%. Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan 2 program, 2 kegiatan dan 5 sub kegiatan.

C. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Pada Urusan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp360.953.497.557,00 dengan realisasi sebesar Rp336.687.524.207,00 atau 93,28%. Urusan ini dilaksanakan oleh 2 SKPD dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Anggaran	Realisasi	%	Jml Program	Jml Kegiatan	Jml Sub kegiatan
1	SEKRETARIAT DAERAH	178.160.044.215,00	168.318.918.126,00	94,48	8	31	101
2	SEKRETARIAT DPRD	182.793.453.342,00	168.368.606.081,00	92,11	2	17	74

D. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Urusan Perencanaan

Pada Urusan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp17.602.886.289,00 dengan realisasi sebesar Rp17.163.099.094,00 atau 97,50%. Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Daerah dengan 3 program, 13 kegiatan dan 37 sub kegiatan.

Urusan Keuangan

Pada Urusan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp 1.033.606.679.244,18 dengan realisasi sebesar Rp 1.022.466.925.530,00 atau 98,92%. Urusan ini dilaksanakan oleh 2 SKPD dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Anggaran	Realisasi	%	Jml Program	Jml Kegiatan	Jml Sub kegiatan
1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	953.834.171.090,18	949.631.309.954,00	99,56	3	14	57
2	BADAN PENDAPATAN DAERAH	79.772.508.154,00	72.835.615.576,00	91,30	2	8	34

Urusan Kepegawaian

Pada Urusan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp16.224.814.278,00 dengan realisasi sebesar Rp15.868.753.704,00 atau 97,81%. Urusan ini dilaksanakan oleh Badan kepegawaian Daerah dengan 2 program, 12 kegiatan dan 43 sub kegiatan.

Urusan Pendidikan dan Pelatihan

Pada Urusan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp18.582.262.337,00 dengan realisasi sebesar Rp17.859.107.731,00 atau 96,11%. Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia dengan 2 program, 11 kegiatan dan 33 sub kegiatan.

Urusan Penelitian dan Pengembangan

Pada Urusan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp8.355.243.983,00 dengan realisasi sebesar Rp7.879.864.505,00 atau 94,31%. Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan dengan 2 program, 11 kegiatan dan 21 sub kegiatan.

Urusan Pengelola Penghubung

Pada Urusan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp16.129.911.165,01 dengan realisasi sebesar Rp14.690.673.680,00 atau 91,08%. Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Penghubung dengan 2 program, 9 kegiatan dan 27 sub kegiatan.

E. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

Urusan Inspektorat Daerah

Pada Penunjang Urusan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp26.171.153.129,00 dengan realisasi sebesar Rp25.633.313.191,00 atau 97,94%. Urusan ini dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi dengan 3 program, 12 kegiatan dan 39 sub kegiatan.

F. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pada urusan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp22.190.378.717,00 dengan realisasi sebesar Rp20.242.114.195,00 atau 91,22% yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dengan 6 program, 12 kegiatan dan 29 sub kegiatan.

Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD yang terhormat, serta hadirin yang berbahagia.

Bertitik tolak dari uraian diatas, secara garis besar realisasi APBD tahun 2025, dapat kami sampaikan dibawah ini, bahwa dimana angka yang ditampilkan ini adalah angka Laporan Keuangan setelah di audit oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Permendagri No.77 Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut :

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025 AUDITED	%	REALISASI 2024 AUDITED
1	2	3	4	5	6
4.	**PENDAPATAN**	**6.268.563.983.516,00**	**6.207.996.645.654,63**	**99,03**	**6.482.418.683.405,20**
4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**2.807.443.163.516,00**	**2.763.868.829.028,63**	**98,45**	**2.942.563.617.866,20**
4.1.01	HASIL PAJAK DAERAH	2.118.471.018.085,00	2.056.281.596.209,75	97,06	2.338.112.925.264,00
4.1.02	RETRIBUSI DAERAH	386.624.597.307,00	440.086.409.242,62	113,83	382.306.933.091,49
4.1.03	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	139.682.145.880,00	126.838.893.909,00	90,81	122.018.602.181,00
4.1.04	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	162.665.402.244,00	140.661.929.667,26	86,47	100.125.157.329,71
4.2.	**PENDAPATAN TRANSFER**	**3.418.953.623.000,00**	**3.405.275.915.726,00**	**99,60**	**3.525.560.271.539,00**
4.2.01	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	3.380.007.413.000,00	3.365.500.418.626,00	99,57	3.496.315.733.539,00
4.2.02	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	38.946.210.000,00	39.775.497.100,00	102,13	29.244.538.000,00
4.3.	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**42.167.197.000,00**	**38.851.900.900,00**	**92,14**	**14.294.794.000,00**
4.3.01	PENDAPATAN HIBAH	22.167.197.000,00	18.851.900.900,00	85,04	14.294.794.000,00
4.3.02	DANA DARURAT	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00	0,00
5.	**BELANJA**	**6.386.298.937.511,43**	**6.041.051.585.846,25**	**94,59**	**6.524.664.745.123,96**
5.1.	**BELANJA OPERASI**	**4.677.715.033.301,66**	**4.392.082.462.719,12**	**93,89**	**4.614.017.505.277,85**
5.1.01	BELANJA PEGAWAI	2.774.495.521.943,00	2.597.123.147.451,76	93,61	2.490.554.904.931,00
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	1.740.825.071.754,66	1.641.154.733.941,36	94,27	1.803.917.885.970,85
5.1.04	BELANJA SUBSIDI	1.125.000.000,00	1.124.442.040,00	99,95	1.500.000.000,00
5.1.05	BELANJA HIBAH	161.269.439.604,00	152.680.139.286,00	94,67	317.914.266.876,00
5.1.06	BELANJA BANTUAN SOSIAL	-	-	-	130.447.500,00
5.2.	**BELANJA MODAL**	**777.207.295.841,28**	**719.602.262.636,13**	**92,59**	**765.506.194.874,35**
5.2.01	BELANJA MODAL TANAH	14.782.202.021,00	10.756.157.250,00	72,76	2.464.373.669,00
5.2.02	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	209.302.203.702,00	193.855.260.182,00	92,62	189.146.437.545,00
5.2.03	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	136.131.470.396,47	117.106.166.907,13	86,02	212.226.274.577,89
5.2.04	BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	354.825.037.644,81	337.550.339.068,00	95,13	317.619.554.844,46
5.2.05	BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	62.166.382.077,00	60.334.339.229,00	97,05	44.031.478.988,00
5.2.06	BELANJA MODAL ASET LAINNYA	-	-	-	18.075.250,00
5.3.	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**9.000.997.000,00**	**7.122.821.563,00**	**79,13**	**5.222.259.811,30**
5.3.1.	BELANJA TIDAK TERDUGA	9.000.997.000,00	7.122.821.563,00	79,13	5.222.259.811,30
5.4.	**BELANJA TRANSFER**	**922.375.611.368,49**	**922.244.038.928,00**	**99,99**	**1.139.918.785.160,46**
5.4.01	BELANJA BAGI HASIL	866.806.142.668,49	866.806.142.668,00	99,99	1.098.402.469.691,00
5.4.02	BELANJA BANTUAN KEUANGAN	55.569.468.700,00	55.437.896.260,00	99,76	41.516.315.469,46
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(117.734.953.995,43)**	**166.945.059.808,38**	**141,80**	**(42.246.061.718,76)**
6.	**PEMBIAYAAN**	**117.734.953.995,43**	**117.722.983.809,12**	**99,99**	**159.981.015.714,19**
6.1.	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**117.734.953.995,43**	**117.722.983.809,12**	**99,99**	**179.981.015.714,19**
6.1.01	PENGGUNAAN SILPA TAHUN SEBELUMNYA	117.734.953.995,43	117.722.983.809,12	99,99	179.981.015.714,19
6.2.	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**-**	**-**	**-**	**20.000.000.000,00**
6.2.02	PENYERTAAN MDOAL PEMERINTAH DAERAH	-	-	-	20.000.000.000,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**0,00**	**284.668.043.617,50**	**-**	**117.734.953.995,43**

Adapun Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp284.668.043.617,50 tersebut diatas, bersumber dari sisa lebih/kurang :

(dalam rupiah)

NOMOR	LEBIH/KURANG	TAHUN 2025 AUDITED	TAHUN 2024 AUDITED
1	2	3	4
4.	**PENDAPATAN DAERAH**	**(60.567.337.861,37)**	**(374.875.469.114,80)**
4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**(43.574.334.487,37)**	**(400.206.281.723,80)**
4.1.01.	HASIL PAJAK DAERAH	(62.189.421.875,25)	(355.338.116.192,00)
4.1.02.	RETRIBUSI DAERAH	53.461.811.935,62	(31.973.789.541,51)
4.1.03.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	(12.843.251.971,00)	(7.606.374.909,00)
4.1.04.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	(22.003.472.576,74)	(5.288.001.081,29)
4.2.	**PENDAPATAN TRANSFER**	**(13.677.707.274,00)**	**28.060.018.609,00**
4.2.01.	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	(14.506.994.374,00)	29.472.280.609,00
4.2.02.	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	829.287.100,00	(1.412.262.000,00)
4.3.	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**(3.315.296.100,00)**	**(2.729.206.000,00)**
4.3.01.	PENDAPATAN HIBAH	(3.315.296.100,00)	(2.729.206.000,00)
4.3.02	DANA DARURAT	0,00	-
5.	**BELANJA**	**345.247.351.665,18**	**493.076.951.821,23**
5.1.	**BELANJA OPERASI**	**285.632.570.582,54**	**239.501.131.784,34**
5.1.01.	BELANJA PEGAWAI	177.372.374.491,24	97.959.109.260,16
5.1.02.	BELANJA BARANG DAN JASA	99.670.337.813,30	131.253.485.831,18
5.1.04.	BELANJA SUBSIDI	557.960,00	0,00
5.1.05.	BELANJA HIBAH	8.589.300.318,00	10.288.536.693,00
5.1.06	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0,00	0,00
5.2.	**BELANJA MODAL**	**57.605.033.205,15**	**91.044.039.710,65**
5.2.01.	BELANJA MODAL TANAH	4.026.044.771,00	13.743.951,00
5.2.02.	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	15.446.943.520,00	34.759.104.833,00
5.2.03.	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	19.025.303.489,34	41.888.667.590,11
5.2.04.	BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	17.274.698.576,81	14.694.055.685,54
5.2.05.	BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	1.832.042.848,00	(311.557.099,00)
5.2.06.	BELANJA MODAL ASET LAINNYA	0,00	24.750,00
5.3.	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**1.878.175.437,00**	**5.265.628.097,70**
5.3.1.	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.878.175.437,00	5.265.628.097,70
5.4.	**BELANJA TRANSFER**	**131.572.440,49**	**157.266.152.228,54**
5.4.01.	BELANJA BAGI HASIL	0,49	151.136.367.698,00
5.4.02.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN	131.572.440,00	6.129.784.530,54
6.	**PELAMPAUAN/PENGHEMATAN PEMBIAYAAN**	**(11.970.186,31)**	**(466.528.711,00)**
6.1.01.	KOREKSI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA	(11.970.186,31)	(466.528.711,00)
6.2.02	SISA PENYERTAAN MODAL	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**284.668.043.617,50**	**117.734.953.995,43**

SILPA tahun 2025 sebesar Rp284.668.043.617,50 tersebut terdiri dari:

1.	**Kas di Kas Daerah**	**222.112.247.663,39**
2.	**Kas BLUD**	**61.077.195.869,33**
	a. RSAM Bkt	40.508.591.284,59
	b. RSJ HB Saanin	2.431.391.340,66
	c. RSUD M Natsir Solok	8.603.475.296,50
	d. RSUD Prof. H. Muhammad Yamin, SH	4.507.250.913,84
	e. Dinkes - BKIM, LABKES, RS Paru	566.214.619,51
	f. Dinas Pendidikan - SMK	2.299.303.215,75

	g. Dinas Pangan	261.390.113,48
	h. Dinas Lingkungan Hidup	1.899.579.085,00
3.	**Kas Di Bendahara Pengeluaran**	**58.409.051,24**
	- Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	0,24
	- Dinas Pendidikan	58.409.051,00
4.	**Kas Di Bendahara Penerimaan**	**3.143,54**
	- Dinas Kesehatan	3.143,54
5.	**Sisa Dana BOS** (Dinas Pendidikan)	**1.420.187.890,00**

Selanjutnya dapat kami sampaikan Posisi Neraca Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2025, dengan uraian sebagai berikut :

1. ASET LANCAR PER 31 DESEMBER 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	2025 AUDITED	2024 AUDITED	KENAIKAN/ PENURUNAN
1	ASET			
2	ASET LANCAR			
3	**Kas dan Setara Kas**	**284.685.402.341,50**	**117.734.953.995,43**	**166.950.448.346,07**
4	- Kas di Kas Daerah	222.112.247.663,39	88.147.677.797,12	133.964.569.866,27
5	- Kas di Bendahara Penerimaan	3.143,54	5.600.000,00	(5.596.856,46)
6	- Kas di Bendahara Pengeluaran	63.706.321,24	323.138.845,31	(259.432.524,07)
7	- Kas di BLUD	61.089.257.323,33	28.036.491.064,00	33.052.766.259,33
8	- Kas BOS/BOSP	1.420.187.890,00	1.222.046.289,00	198.141.601,00
9	- Kas Lainnya	0,00	0,00	0,00
10	**Investasi Jangka Pendek**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**Piutang Pendapatan**	**261.717.216.619,20**	**207.925.042.294,20**	**53.792.174.325,00**
12	- Piutang Pajak Daerah	66.777.367.157,00	59.890.385.232,00	8.375.714.345,00
13	- Piutang Retribusi	7.329.884.059,00	11.583.451.751,00	9.963.393.373,00
14	- Piutang Hasil PKD Yang Dipisahkan	116.028.563.607,00	127.297.967.456,00	5.279.365.275,00
16	- Piutang Lain2 PAD Yg Sah	881.340.796,20	2.711.795.855,20	(16.963.710.257,27)
17	- Piutang Transfer Pemerintah Pusat	70.700.061.000,00	6.441.442.000,00	6.441.442.000,00
118	**Piutang Lainnya**	**12.600.000,00**	**28.800.000,00**	**(16.200.000,00)**
119	- Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	12.600.000,00	28.800.000,00	(16.200.000,00)
18	**Penyisihan Piutang**	**(5.990.934.389,96)**	**(12.149.166.360,11)**	**6.158.231.970,15**
19	- Penyisihan Piutang Pendapatan	(5.990.871.389,96)	(12.149.022.360,11)	6.158.150.970,15
20	- Peny Piutang Lainnya	(63.000,00)	(144.000,00)	81.000,00
21	**Beban Dibayar Dimuka**	**4.161.645.886,00**	**3.509.417.517,00**	**652.228.369,00**
22	**Persediaan**	**412.788.369.441,61**	**384.337.939.703,51**	**28.450.429.738,10**
23	**JUMLAH ASET LANCAR**	**957.374.299.898,35**	**701.386.987.150,03**	**255.987.312.748,32**

Jumlah diatas adalah nilai Aset Lancar beserta rinciannya per 31 Desember 2025 dan 2024.

2. INVESTASI JANGKA PANJANG PER 31 DESEMBER 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	2025 AUDITED	2024 AUDITED	KENAIKAN/ PENURUNAN
1	**INVESTASI JANGKA PANJANG**			
2	**Investasi Non Permanen**	**3.135.244.683,00**	**3.135.244.683,00**	**0,00**
3	Dana Bergulir	10.581.879.188,00	10.581.879.188,00	**0,00**
4	Penyisihan Dana Bergulir	(7.446.634.505,00)	(7.446.634.505,00)	**0,00**
5	**Investasi Permanen**	**1.759.688.220.415,88**	**1.713.178.683.660,58**	**46.509.536.755,30**
6	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1.759.688.220.415,88	1.713.178.683.660,58	46.509.536.755,30
7	**JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG**	**1.762.823.465.098,88**	**1.716.313.928.343,58**	**46.509.536.755,30**

Jumlah diatas adalah nilai Investasi Jangka Panjang beserta rinciannya per 31 Desember 2025 dan 2024.

3. ASET TETAP PER 31 DESEMBER 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	2025 AUDITED	2024 AUDITED	KENAIKAN/ PENURUNAN
1	**ASET TETAP**			-
2	Tanah	2.338.365.198.412,82	2.317.257.971.575,32	21.107.226.837,50
3	Peralatan dan Mesin	3.260.342.484.146,37	3.100.523.394.031,89	159.819.090.114,48
4	Gedung dan Bangunan	5.024.401.585.904,76	4.876.017.515.758,74	148.384.070.146,02
5	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	7.616.113.776.515,20	7.128.701.627.636,34	487.412.148.878,86
6	Aset Tetap Lainnya	535.708.678.404,16	472.833.248.677,75	62.875.429.726,41
7	Konstruksi Dalam Pengerjaan	978.812.746.127,67	1.008.192.923.821,67	(29.380.177.694,00)
8	**Akumulasi Penyusutan**			
9	Akm Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.722.696.969.685,30)	(2.541.843.355.236,40)	(180.853.614.448,90)
10	Akm Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.300.047.854.057,16)	(1.200.198.046.068,18)	(99.849.807.988,98)
11	Akm Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(5.869.495.240.434,24)	(5.484.889.516.019,23)	(384.605.724.415,01)
12	Akm Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(14.781.129.004,01)	(14.412.751.187,55)	(368.377.816,46)
13	**JUMLAH ASET TETAP**	**9.846.723.276.330,27**	**9.662.183.012.990,35**	**184.540.263.339,92**

Jumlah diatas adalah nilai Aset Tetap beserta rinciannya per 31 Desember 2025 dan 2024.

4. ASET LAINNYA DAN INVESTASI PROPERTI PER 31 DESEMBER 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	2025 AUDITED	2024 AUDITED	KENAIKAN/ PENURUNAN
1	**ASET LAINNYA**			-
2	**Tagihan Jangka Panjang**	**49.976.619.769,00**	**49.976.619.769,00**	**-**
3	- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	49.976.619.769,00	49.976.619.769,00	-
4	**Kemitraan dengan Pihak Ketiga**		**0,00**	**-**
5	**Aset Tidak Berwujud**	**33.505.981.115,00**	**33.449.565.365,00**	**56.415.750,00**
6	**Aset Lain-lain**	**213.586.256.573,46**	**220.067.058.415,09**	**(6.480.801.841,63)**
7	- Aset Tidak Bermanfaat/Rusak Berat	120.883.689.776,36	127.829.488.311,09	**(6.945.798.534,73)**
8	Aset Yang Dibatasi Penggunaannya	92.702.566.797,10	92.237.570.104,00	**464.996.693,10**
9	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	-	0,00	**-**
10	**Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud**	**(33.410.489.218,44)**	**(33.090.404.483,00)**	**(320.084.735,44)**
11	**Akumulasi Penyusutan Aset Lain lain**	**(69.159.519.214,22)**	**(78.491.625.303,35)**	**9.332.106.089,13**
12	- Akm Penyusutan Aset Tidak Bermanfaat	(69.159.519.214,22)	(78.491.625.303,35)	**9.332.106.089,13**
	JUMLAH ASET LAINNYA	**194.498.849.024,80**	**191.911.213.762,74**	**2.587.635.262,06**

13	**PROPERTI INVESTASI**			-
14	- Properti Investasi Tanah	76.232.200.000,00	76.232.200.000,00	-
16	- Properti Investasi Geddung dan Bangunan	35.344.419.000,00	35.344.419.000,00	-
	- Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(23.327.316.540,00)	(22.620.428.160,00)	**(706.888.380,00)**
17	**JUMLAH PROPERTI INVESTASI**	**88.249.302.460,00**	**88.956.190.840,00**	**(706.888.380,00)**

Jumlah diatas adalah nilai Aset Lainnya dan Investasi Properti beserta rinciannya per 31 Desember 2025 dan 2024.

5. KEWAJIBAN DAN EKUITAS PER 31 DESEMBER 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	2025 AUDITED	2024 AUDITED	KENAIKAN/ PENURUNAN
1	**KEWAJIBAN**			
2	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**			
3	**Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**	**73.617.392,00**	**56.258.668,00**	**17.358.724,00**
4	**Pendapatan Diterima Dimuka**	**9.599.791.668,00**	**25.417.880.044,90**	**(15.818.088.376,90)**
5	**Utang Belanja**	**428.973.325.563,12**	**510.698.511.821,58**	**(81.725.186.258,46)**
6	Utang Belanja Pegawai	3.753.055.360,24	34.335.621.211,00	(30.582.565.850,76)
7	Utang Belanja Barang Jasa	109.220.495.080,88	81.400.664.565,58	27.819.830.515,30
8	Utang Belanja Modal	3.625.960.905,00	38.609.448.998,00	(34.983.488.093,00)
9	Utang Transfer	312.373.814.217,00	356.352.777.047,00	(43.978.962.830,00)
10	**Utang Jangka Pendek Lainnya**	**41.983.599.000,00**	**27.627.718.000,00**	**14.355.881.000,00**
11	**Jumlah Kewajiban Jangka Pendek**	**480.630.333.623,12**	**563.800.368.534,48**	**(83.170.034.911,36)**
12	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**			
13	Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00
14	**Jumlah Kewajiban Jangka Panjang**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**JUMLAH KEWAJIBAN**	**480.630.333.623,12**	**563.800.368.534,48**	**(83.170.034.911,36)**
16	**EKUITAS**	**12.369.038.859.189,18**	**11.796.950.964.552,20**	**572.087.894.636,98**
17	**JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS**	**12.849.669.192.812,30**	**12.360.751.333.086,70**	**488.917.859.725,60**

Jumlah diatas adalah nilai Kewajiban dan Ekuitas beserta rinciannya per 31 Desember 2025 dan 2024.

Sehubungan dengan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025 maka selanjutnya dapat kami sampaikan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan uraian sebagai berikut :

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2025 AUDITED	2024 AUDITED
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	117.734.953.995,43	180.447.544.425,19
2	Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(117.722.983.809,12)	(179.981.015.714,19)
3	**Sub Total**	**11.970.186,31**	**466.528.711,00**
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	284.668.043.617,50	117.734.953.995,43
5	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(11.970.186,31)	(466.528.711,00)
6	Lain-lain	0,00	0,00
7	**Saldo Anggaran Lebih Akhir**	**284.668.043.617,50**	**117.734.953.995,43**

LAPORAN OPERASIONAL

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2025 AUDITED	2024 AUDITED
1	**KEGIATAN OPERASIONAL**		
2	**PENDAPATAN-LO**		
3	**PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO**		
4	Pendapatan Pajak Daerah -LO	2.078.517.741.533,75	2.331.128.478.240,00
5	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	435.980.928.855,62	376.121.559.262,83
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -LO	116.028.563.607,00	127.297.967.456,00
7	Lain-lain PAD yang Sah-LO	138.547.966.357,59	92.100.710.941,93
8	**JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO**	**2.769.075.200.353,96**	**2.926.648.715.900,76**
9	**PENDAPATAN TRANSFER-LO**		
10	**Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan-LO**		
11	Dana Bagi Hasil LO	174.378.188.000,00	158.228.105.000,00
12	Dana Alokasi Umum-LO	2.139.604.036.666,00	2.146.789.947.987,00
13	Dana Alokasi Khusus-LO	1.035.923.799.960,00	1.139.840.043.552,00
14	Dana Insentif Daerah-LO	0,00	0,00
15	Insentif Fiskal	15.594.394.000,00	13.249.284.000,00
16	**JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN-LO**	**3.365.500.418.626,00**	**3.458.107.380.539,00**
17	**Transfer Pemerintah Pusat/Daerah Lainnya-LO**		
18	Bantuan Keuangan -LO	39.775.497.100,00	29.244.538.000,00
19	**JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER LAINNYA-LO**	**39.775.497.100,00**	**29.244.538.000,00**
20	**JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER-LO**	**3.405.275.915.726,00**	**3.487.351.918.539,00**
22	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH-LO**		
22	Pendapatan Hibah-LO	400.361.467.910,83	141.448.740.315,60
23	Pendapatan Lainnya - LO	20.000.000.000,00	0,00
24	**JUMLAH PENDAPATAN LAIN-LAIN YANG SAH-LO**	**420.361.467.910,83**	**141.448.740.315,60**
25	**JUMLAH PENDAPATAN-LO**	**6.594.712.583.990,79**	**6.555.449.374.755,36**
26	**BEBAN**		
27	Beban Pegawai	2.566.507.015.046,00	2.515.997.454.980,00
28	Beban Barang dan Jasa	1.692.134.871.006,30	1.798.554.944.588,19
29	Beban Bunga	0,00	0,00
30	Beban Subsidi	1.124.442.040,00	1.500.000.000,00
31	Beban Hibah	152.680.139.286,00	317.914.266.876,00
32	Bantuan Sosial		130.447.500,00
33	Beban Penyisihan Piutang	2.450.316.082,14	6.585.362.941,09
34	**Beban Penyusutan dan Amortisasi**		
35	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	195.347.544.808,03	203.555.135.875,93
36	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	101.322.747.703,70	99.453.715.891,08
37	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	244.271.790.058,14	287.665.701.305,62
38	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	381.699.483,30	396.156.883,07
39	Beban Penyusutan Aset Lainnya		0,00
40	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	338.822.269,68	363.085.674,50
41	Beban Penyusutan Properti Investasi	706.888.380,00	58.907.365,00
42	**JUMLAH BEBAN OPERASI**	**4.957.266.276.163,29**	**5.232.175.179.880,48**
43	**Beban Tidak Terduga**		
44	Beban Tidak Terduga	7.044.827.563,00	5.182.916.341,30

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2025 AUDITED	2024 AUDITED
45	**Beban Transfer**		
46	Beban Transfer	878.265.076.098,00	1.178.972.339.969,46
47	Beban Lain-lain	0,00	0,00
48	**JUMLAH BEBAN**	**5.842.576.179.824,29**	**6.416.330.436.191,24**
49	**SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL**	**752.136.404.166,50**	**139.118.938.564,12**
50	**SURPLUS/DEFISIT OPERASIONAL KEGIATAN NON OPERASIONAL**		
51	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	207.895.200,00	585.058.880,00
52	Surplus Penyelesaian Kew Jk Panjang	0,00	0,00
53	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00
54	Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya	16.538.339.691,69	8.754.284.281,44
55	**JUMLAH SURPLUS/DEFISIT OPERASIONAL KEGIATAN NON OPERASIONAL**	**(16.330.444.491,69)**	**(8.169.225.401,44)**
56	**SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA**	**735.805.959.674,81**	**130.949.713.162,68**
57	**POS LUAR BIASA**		
58	Pendapatan Luar Biasa		0,00
59	Beban Luar Biasa		0,00
60	**JUMLAH POS LUAR BIASA**		**0,00**
61	**SURPLUS/DEFISIT LO**	**735.805.959.674,81**	**130.949.713.162,68**

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	2025 AUDITED	2024 AUDITED
1	Ekuitas Awal	11.796.950.964.552,20	11.698.383.180.031,40
2	*Surplus/Defisit-LO*	*735.805.959.674,81*	*130.949.713.162,68*
3	**Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar**	**(163.718.065.037,83)**	**(32.381.928.641,89)**
	KOREKSI TAMBAH	**700.837.386.513,91**	**415.690.225.713,54**
a	Koreksi Aset Lancar	100.527.360.514,95	96.297.145.207,74
b	Piutang dan Penyisihan Piutang	77.402.893.075,31	8.350.473.870,81
c	Koreksi Investasi Jangka Panjang	52.771.390.537,34	70.663.192.237,48
d	Koreksi Aset Tetap	436.681.906.860,08	54.077.941.240,26
e	Koreksi Aset Lainnya	464.996.693,36	91.719.680.247,47
f	Koreksi Kewajiban Jangka Pendek	32.988.838.832,87	2.344.222.805,78
g	Koreksi Kewajiban Jangka Panjang	0,00	92.237.570.104,00
	KOREKSI KURANG	**(864.555.451.551,74)**	**(448.072.154.355,43)**
a	Koreksi Aset Lancar	(249.208.845.658,81)	(342.082.569.257,98)
b	Piutang dan Penyisihan Piutang	(7.000.826.052,00)	(1.239.647.270,45)
c	Koreksi Investasi Jangka Panjang	(6.261.853.782,04)	0,00
d	Koreksi Aset Tetap	*(558.853.669.225,14)*	*(40.023.283.061,89)*
e	Koreksi Aset Lainnya	(250.132.565,76)	(25.328.798.590,72)
f	Koreksi Kewajiban Jangka Pendek	(42.980.124.267,99)	(39.397.856.174,39)
g	Koreksi Kewajiban Jangka Panjang		0,00
4	**Ekuitas Akhir**	**12.369.038.859.189,18**	**11.796.950.964.552,20**

LAPORAN ARUS KAS

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2025 AUDITED	2024 AUDITED
1	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI**		
2	Arus Masuk Kas	6.207.788.750.454,63	6.481.833.624.525,20
3	Arus Keluar Kas	5.321.449.323.210,12	5.759.158.550.249,61
4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (2-3)	886.339.427.244,51	722.675.074.275,59
5	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI**		
6	Arus Masuk Kas	207.895.200,00	585.058.880,00
7	Arus Keluar Kas	719.602.262.636,13	785.506.194.874,35
8	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (6-7)	(719.394.367.436,13)	(784.921.135.994,35)
9	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN**		
10	Arus Masuk Kas		0,00
11	Arus Keluar Kas		0,00
12	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (10-11)		0,00
13	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS**		
14	Arus Masuk Kas	191.682.511.785,60	247.245.079.465,20
15	Arus Keluar Kas	191.677.123.247,91	247.711.608.176,20
16	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (14-15)	5.388.537,69	(466.528.711,00)
17	**Kenaikan/Penurunan Kas (4+8+12+16)**	**166.950.448.346,07**	**(62.712.590.429,76)**
18	**Saldo Awal Kas di Kasda & Kas di Bendahara (19 s.d 24)**	**117.734.953.995,43**	**180.447.544.425,19**
19	Kas di Kas Daerah	88.147.677.797,12	148.044.084.493,35
20	Kas BLUD	28.036.491.064,00	30.888.069.226,84
21	Kas BOS	1.222.046.289,00	1.510.360.705,00
22	Kas Bendahara Pengeluaran	323.138.845,31	4.100.000,00
23	Kas Bendahara Penerimaan	5.600.000,00	930.000,00
24	Kas Lainnya		0,00
25	**Saldo Akhir Kas di Kasda & Kas di Bendahara (17 + 18)**	**284.685.402.341,50**	**117.734.953.995,43**
26	**Saldo Akhir Kas di Kasda & Kas di Bendahara (27 s.d 32)**	**284.685.402.341,50**	**117.734.953.995,43**
27	Kas di Kas Daerah	222.112.247.663,39	88.147.677.797,12
28	Kas BLUD	61.089.257.323,33	28.036.491.064,00
29	Kas BOS/BOSP	1.420.187.890,00	1.222.046.289,00
30	Kas Bendahara Pengeluaran	63.706.321,24	323.138.845,31
31	Kas Bendahara Penerimaan	3.143,54	5.600.000,00
32	Kas Lainnya	0,00	0,00
33	**Jumlah Kas Per 31 Desember 2025/2024 (25)**	**284.685.402.341,50**	**117.734.953.995,43**

Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD yang terhormat, serta hadirin yang berbahagia.

Dengan telah disampaikannya Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025 ini, tentu masih terdapat kekurangan dan kelemahannya, oleh sebab itu mohon dukungan dari Anggota Dewan yang terhormat untuk senantiasa secara bersama-sama membangun dan memperbaiki kinerja untuk mewujudkan obsesi peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga kekurangan dan kelemahan yang ada terus diupayakan penyelesaiannya.

Dengan adanya keharmonisan yang telah terbangun selama ini, saya semakin optimis terhadap peningkatan kinerja pemerintah, hal ini sangat realistis karena dukungan politis dari Dewan yang terhormat, partisipasi masyarakat yang semakin berkembang dan tentu saja peran

fasilitasi pemerintah sebagai mediasi baik dalam kerangka regulasi dan kebijakan maupun anggaran akan mampu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Akhirnya pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua Dewan dan seluruh anggota DPRD serta semua pihak yang menunjukkan kepedulian terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025, kita mengharapkan agar dalam pembahasan sidang-sidang DPRD yang sudah diatur oleh Badan Musyawarah dapat berjalan lancar, efisien dan efektif, sehingga Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2025 dapat ditetapkan oleh DPRD sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Wabillahitaufik Walhidayah.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Padang, 18 Juni 2026

Plt. GUBERNUR
WAKIL GUBERNUR

VASKO RUSEIMY

GUBERNUR SUMATERA BARAT

PENDAPAT AKHIR
PENGAMBILAN KEPUTUSAN DPRD
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

SENIN, 20 JULI 2026

==========

ASSALAMU'ALAIKUM WA RAHMATULLAHI WA BARAKATUH.

YTH. KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.

YTH. REKAN-REKAN ANGGOTA FORKOPIMDA.

YTH. SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI , ASISTEN, KEPALA SKPD, BIRO, RUMAH SAKIT DAERAH, DAN BUMD DI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

YTH. PIMPINAN INSTANSI VERTIKAL DAN BUMN.

YTH. REKAN-REKAN PERS, MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK, SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

PUJI DAN SYUKUR SENANTIASA KITA SEMBAHKAN KE HADIRAT ALLAH S.W.T, DENGAT RAHMAT DAN KARUNIANYA KITA DIBERIKAN KESEHATAN DAN KESEMPATAN SEHINGGA DAPAT MELAKSANAKAN TUGAS DAN PENGABDIAN KEPADA BANGSA, NEGARA DAN MASYARAKAT, SERTA PADA HARI INI KITA DAPAT MELAKSANAKAN DAN MENGIKUTI RAPAT PARIPURNA DPRD DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025.

SHALAWAT BESERTA SALAM KITA PERUNTUKKAN BAGI NABI BESAR MUHAMMAD S.A.W, YANG TELAH MEMBERIKAN PETUNJUK, PEDOMAN SERTA BIMBINGAN KEPADA UMAT-NYA UNTUK KEBAHAGIAAN DI DUNIA DAN AKHIRAT.

SAUDARA KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN SERTA HADIRIN YANG TERHORMAT,

PERTAMA SEKALI IJINKAN KAMI ATAS NAMA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT MENYAMPAIKAN UCAPAN TERIMA KASIH DAN PENGHARGAAN YANG SETINGGI-TINGGINYA KEPADA PIMPINAN DAN SEGENAP ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT, YANG TELAH MENCURAHKAN PERHATIAN, TENAGA, DAN PEMIKIRAN DALAM PEMBAHASAN RANPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN 2025, BAIK MELALUI RAPAT KERJA KOMISI, BANGGAR, MAUPUN PEMBAHASAN BERSAMA TAPD, HINGGA SAMPAI PADA RAPAT PARIPURNA HARI INI.

SELURUH PROSES BERLANGSUNG SECARA DINAMIS, TERBUKA, KRITIS NAMUN TETAP DILANDASI SEMANGAT KEMITRAAN YANG SALING MENGHORMATI, DIMANA KITA KETAHUI BERSAMA BAHWA PENYAMPAIAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD MERUPAKAN AMANAT PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN SEKALIGUS WUJUD AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH KEPADA MASYARAKAT DALAM

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

PADA KESEMPATAN INI KAMI JUGA MENYAMPAIKAN UCAPAN TERIMA KASIH SECARA KHUSUS KEPADA BADAN ANGGARAN DPRD DAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH YANG TELAH BEKERJA KERAS SAMPAI AKHIRNYA RANCANGAN PERATURAN DAERAH INI BISA DISEPAKATI BERSAMA.

KAMI YAKIN DAN PERCAYA BAHWA DARI HASIL PEMBAHASAN DAN EVALUASI YANG TELAH DILAKSANAKAN, TERDAPAT SARAN, KRITIKAN DAN MASUKAN YANG KONSTRUKTIF TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH.

TERHADAP SELURUH CATATAN, SARAN, DAN MASUKAN YANG DISAMPAIKAN OLEH DPRD, AKAN MENJADI PERHATIAN SERIUS PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK PERBAIKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN KE DEPAN.

.

SAUDARA KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN SERTA HADIRIN YANG TERHORMAT,

SETELAH MELEWATI TAHAPAN PERSIDANGAN DAN SERANGKAIAN PEMBAHASAN SECARA MENDALAM TERHADAP SEGALA ASPEK YANG RELEVAN TERHADAP RANPERDA INI, MAKA PADA HARI INI KITA TELAH SAMPAI PADA TAHAP PENETAPAN KEPUTUSAN DPRD TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025.

HAL INI MEMBERIKAN GAMBARAN KEPADA KITA SEMUA BAHWA PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD MEMPUNYAI PEMIKIRAN YANG SAMA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DI MASA-MASA YANG AKAN DATANG UNTUK BISA LEBIH BAIK DAN BISA MEMBERIKAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KEPADA MASYARAKAT DALAM SEGALA ASPEK.

SAUDARA KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN SERTA HADIRIN YANG TERHORMAT,

DENGAN TELAH DISETUJUINYA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025 PADA HARI INI, MAKA KITA TELAH MENUNTASKAN SALAH SATU SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DENGAN BAIK, MELALUI SINERGI DAN KERJASAMA YANG KONSTRUKTIF ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD.

SEBAGAI TAHAP SELANJUTNYA, PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT AKAN SEGERA MENYAMPAIKAN RANCANGAN INI KEPADA MENTERI DALAM NEGERI UNTUK DIEVALUASI SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU, YAKNI 3 (TIGA) HARI SETELAH NOTA PERSETUJUAN BERSAMA RANCANGAN INI DITANDATANGANI.

MUDAH-MUDAHAN DALAM TAHAP AKHIR NANTI, EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN

ANGGARAN 2025 TIDAK MENGALAMI KENDALA YANG BERARTI.

AKHIRNYA KEHADIRAT ALLAH SWT KITA BERDO'A, SEMOGA MELIMPAHKAN TAUFIK DAN HIDAYAH-NYA KEPADA KITA SEMUA SERTA MEMBERIKAN PETUNJUK DAN KEKUATAN LAHIR BATIN DALAM MELANJUTKAN DAN MENGEMBAN AMANAH MEMBANGUN RANAH MINANG YANG KITA CINTAI.

WABILLAHITAUFIK WALHIDYAH, WASSAMU'ALAIKUM WR. WB.

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MAHYELDI

PIDATO
PIMPINAN RAPAT PARIPURNA DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN ACARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN
TERHADAP RANPERDA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025
SENIN, 20 JULI 2026

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

YTH. SDR. GUBERNUR SUMATERA BARAT
YTH. FORKOPIMDA PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. SDR. PIMPINAN DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI, ASISTEN, PIMPINAN OPD, DILINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. SDR. PIMPINAN PT. BANK NAGARI, PIMPINAN BUMD
YTH. SDR. TENAGA AHLI DPRD, REKAN-REKAN WARTAWAN DAN UNDANGAN SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, siang hari ini kita dapat kembali melaksanakan Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam acara :

1. Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, dan
2. Penyampaian Nota Pengantar terhadap Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2026.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur, Forkopimda, Sekretaris Daerah, Pimpinan OPD, undangan dan Hadirin semua yang telah berkenan menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada siang hari ini.

Dengan mengucapkan ”Bismillahirrahmanirrahim" Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat pada hari ini, Senin tanggal 20 Juli 2026, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

.....(Ketokan Palu 3 Kali).

Sesuai dengan Tata Tertib, Rapat Paripurna untuk penetapan Ranperda dan APBD, dihadiri lebih dari 2/3 (dua per tiga) jumlah Anggota DPRD.

.....

Pimpinan Rapat Membacakan Daftar Hadir Anggota

.....

Memperhatikan kehadiran Anggota DPRD telah memenuhi kourum, maka Rapat Paripurna telah dapat kita laksanakan.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna yang kami Hormati;

Sesuai dengan agenda yang ditetapkan dalam rapat Badan Musyawarah tanggal 11 Juni 2026, pada hari ini akan dilaksanakan 2 (dua) agenda rapat paripurna, yaitu Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025 dan Penyampaian Nota Pengantar terhadap Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2026.

Berhubung belum tuntasnya penyusunan Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2026 oleh karena belum keluarnya hasil fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 yang menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2026, maka Gubernur Sumatera Barat melalui surat Nomor

: 900.1.1/911/APKD/BPKAD/2026 tanggal 17 Juli 2026, meminta untuk penjadwalan kembali rapat paripurna penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2026.

Dengan demikian, pada rapat paripurna hari ini, kita hanya melaksanakan 1 (satu) agenda saja, yaitu Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Sesuai dengan amanat Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa dalam rangka akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, pada rapat paripurna tanggal 18 Juni 2026 yang lalu, Gubernur Sumatera Barat telah menyampaikan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, untuk selanjutnya di bahas dan disepakati bersama dengan DPRD.

Sesuai dengan tahapan dan mekanisme pembahasan, DPRD bersama Pemerintah Daerah telah melakukan pembahasannya mulai dari pembahasan pendahuluan oleh Komisi bersama OPD dan dilanjutkan dengan pembahasan dan finalisasi oleh Badan Anggaran Bersama TAPD.

Berhubung Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan sarana evaluasi yang menyeluruh terhadap pelaksanaan APBD, maka dalam pembahasannya tidak hanya menyangkut pada realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah atau SILPA, akan tetapi juga mencakup aspek efektivitas, efisien, akuntabilitas serta capaian target kinerja program dan kegiatan yang dicapai.

Dari pembahasan yang telah dilakukan oleh Badan Anggaran Bersama TAPD terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, secara umum dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Secara umum kinerja pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2025, telah cukup maksimal. Dalam kondisi APBD yang terkontraksi cukup dalam pasca

dikeluarkannya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 serta terjadinya banjir hidrometeorologi di akhir tahun 2025 yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur fisik, ekonomi dan sosial, realisasi pendapatan daerah masih bisa diwujudkan sebesar 99,03 % dan realisasi belanja juga dapat direalisasikan sebesar 94,59 %. Demikian juga dari aspek akuntabilitas dan transpransinya, BPK memberikan opini WTP terhadap LKPD Tahun 2025.

2. Capaian realisasi pendapatan dan belanja dalam pelaksanaan APBD Tahun 2025 tersebut, tentu bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah ditengah-tengah kondisi yang tidak menguntungkan. Untuk itu, kami dari DPRD Provinsi Sumatera Barat memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Daerah dalam pengelolaan APBD Tahun 2025.
3. Meskipun kinerja dalam pengelolaan APBD Tahun 2025 telah cukup baik, namun masih ada beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah, baik terhadap kinerja dalam pengelolaan pendapatan maupun belanja daerah, agar

APBD semakin berkualitas, semakin efektif dan efisien dan memberikan kontribusi yang maksimal untuk Pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat.

Untuk lebih lengkapnya hasil pembahasan yang dilakukan oleh Badan Anggaran Bersama TAPD terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2025, termuat dalam laporan Badan Anggaran yang akan disampaikan nanti oleh Badan Anggaran pada rapat paripurna ini.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang kami Hormati;

Sebelum hasil pembahasan Badan Anggaran bersama TAPD terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025 dilanjutkan pada tahap pembicaraan Tingkat kedua dalam Rapat Paripurna ini, diakhir pembahasan pembicaraan tingkat pertama, Fraksi-Fraksi telah menyampaikan Pendapat Akhir Fraksinya.

Dari pendapat akhir Fraksi-Fraksi tersebut, semua Fraksi dapat menyetujui hasil pembahasan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025, dilanjutkan pada tahap pengambilan keputusan pada Rapat Paripurna dan disamping itu, Fraksi-Fraksi juga memberikan catatan dan masukan yang perlu menjadi perhatian dan ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah, agar kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat menjadi lebih baik.

Sesuai dengan agenda pada tahap pembicaraan tingkat kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, pada rapat paripurna ini, Badan Anggaran akan menyampaikan Laporan hasil pembaha[8]a terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan dan Penetapan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

Sesuai dengan urutan kegiatan tersebut, kita minta kepada Sdr. Sekretaris DPRD selaku Sekretaris Badan Anggaran untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan

terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025.

……..

Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025

……

Terima kasih kami sampaikan Sekretaris DPRD yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025.

Selanjutnya kami menanyakan kepada rekan-rekan Anggota Dewan, apakah dapat menyetujui hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh Badan Anggaran bersama TAPD terhadap Rar [9] ι Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025 ?

……. (ketokan palu 1 x)

Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan Anggota Dewan yang telah memberikan persetujuannya terhadap hasil pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025 yang telah dilakukan oleh Badan Anggaran bersama TAPD.

Sesuai dengan maksud Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, telah disiapkan konsep Keputusan DPRD tentang Persetujuan DPRD terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan konsep Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

Untuk itu, diminta kepada Sdr. Sekretaris DPRD membacakan konsep Keputusan DPRD dan Nota Kesepakatan Bersama antara Gubernur dan DPRD tersebut.

……

……. [10]

Pembacaan Konsep Keputusan DPRD dan Kesepakatan Bersama tentang Ranperda PPA Tahun 2025

……

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Sekretaris DPRD yang telah membacakan konsep Keputusan DPRD dan Kesepakatan Bersama tentang Ranperda

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Selanjutnya kami menanyakan kepada Rekan-Rekan Anggota DPRD, apakah dapat menyetujui konsep Keputusan DPRD untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD dan Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025, untuk ditanda tangani oleh Gubernur dan Pimpinan DPRD ?

……. (ketukan palu 1 x)

Terima kasih kami sampaikan kepada Rekan-Rekan Anggota DPRD yang telah memberikan persetujuannya terhadap konsep Keputusan DPRD untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD dan Penandatanganan Persetujuan Bersama terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025.

Pada kesempatan ini, dapat kami informasikan bahwa Keputusan DPRD dimaksud diberikan Nomor : 9/SB/2026 tentang Persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 untuk dtetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Dengan telah ditetapkannya Keputusan DPRD tentang Persetujuan DPRD terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025, maka acara kita lanjutkan dengan penandatangan Kesepakatan Bersama Gubernur dan DPRD terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Untuk itu, kepada Sdr. Gubernur dan Pimpinan DPRD, kami persilahkan menuju tempat yang telah ditentukan.

……..

Penandatanganan Kesepa[12] Bersama Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025

……..

Sdr. Gubernur dan Hadirin Yang Kami Hormati;

Dengan telah ditanda tanganinya Nota Persetujuan Bersama oleh Gubernur dan Pimpinan DPRD, maka sesuai

dengan agenda pada rapat paripurna ini, acara dilanjutkan dengan Penyampaian Pendapat Akhir/ Sambutan Gubernur Sumatera Barat.

Untuk itu, kepada Sdr. Gubernur kami persilahkan.

……

Penyampaian Pendapat Akhir/Sambutan Gubernur

……

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur yang telah menyampaikan Sambutan/Pendapat Akhirnya terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang kami Hormati;

Dalam Pasal 195 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 [13] ıskan, bahwa Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD yang telah disepakati bersama oleh Kepala Daerah dan DPRD, disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak disepakati kepada Menteri Dalam Negeri, untuk dievaluasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengingatkan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat memenuhi batasan waktu penyampaiannya kepada Menteri Dalam Negeri, agar Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, dapat segera dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri.

Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Dengan telah disepakatinya Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025, maka berakhir pulalah rapat paripurna pada hari ini. Sebelum Rapat Paripurna ini kami tutup, kami menyampaikan permohonan maaf kepada hadirin dan undangan semua, apabila dalam pelaksanaan Rapat Paripurna ini, terdapat hal-hal yang tidak berkenan pada kita semua.

Akhirnya [14] an mengucapkan Alhamdulillahirabbilalamin, Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penetapan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025 pada hari ini, secara resmi kami tutup.

Terima kasih
Billahitaufiq walhidayah
Wassalam'mualikum wr.wb

PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT PERIODE 2024 – 2029

TERHADAP

PEMBAHASAN RANPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN APBD TAHUN 2025.

DISAMPAIKAN OLEH : AGUS SYAHDEMAN, S.E.

DALAM

RAPAT PEMBAHASAN AKHIR DALAM RANGKA PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI TERHADAP RANPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN APBD TAHUN 2025.

Tanggal, 20 Juli 2026

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Partai Demokrat

DPRD Provinsi Sumatera Barat Periode 2024 – 2029

Terhadap Ranperda Tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025

Tanggal, 20 Juli 2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr Wb, Selamat pagi, Salam Sejahtera bagi kita semua.

Yang kami hormati; Saudara Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Saudara Sekretaris Daerah, Staff Ahli, Asisten, Kepala Dinas/Badan/Biro lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan jajaran Aparatur Sipil Negara beserta tamu undangan yang telah membersamai kita semua dalam pembahasan program kegiatan pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat.

Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah Subḥānahu wa Ta'ālā, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan rapat pembahasan akhir DPRD Provinsi Sumatera Barat pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Rapat Kerja Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Pada kesempatan berbahagia ini, Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Barat menyampaikan **Pendapat Akhir Fraksi Partai Demokrat terhadap Ranperda Tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025.**

Pandangan ini merupakan wujud tanggung jawab konstitusional dan politik Fraksi Demokrat untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal daerah benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat, menjaga kesinambungan pembangunan, serta memperkuat daya saing Sumatera Barat di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks.

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bagian penting dari siklus pengelolaan keuangan daerah. Melalui pembahasan ini, DPRD menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan anggaran tidak hanya memenuhi aspek administratif dan akuntabilitas, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta menjadi dasar penyempurnaan perencanaan pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.

Fraksi Partai Demokrat menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Badan Anggaran DPRD, serta seluruh perangkat daerah yang telah menyelesaikan proses penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD Tahun 2025 sehingga dapat dibahas secara bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rapat Kerja Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan hasil pembahasan serta laporan Badan Anggaran DPRD, Fraksi Partai Demokrat mencermati bahwa secara umum pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2025 telah berjalan dengan cukup baik.

Realisasi pendapatan daerah mencapai **Rp6,208 triliun** atau sekitar **98,97 persen** dari target, sedangkan realisasi belanja daerah mencapai **Rp6,041 triliun** atau **94,59 persen**. Di sisi lain, APBD yang pada awalnya diproyeksikan mengalami defisit justru berakhir dengan **surplus sebesar Rp166,95 miliar** dan menghasilkan **SILPA sebesar Rp284,67 miliar.**

Capaian tersebut menunjukkan bahwa stabilitas pengelolaan fiskal daerah relatif terjaga, meskipun tahun 2025 dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain kebijakan efisiensi nasional melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 serta dampak bencana hidrometeorologi yang memerlukan penyesuaian terhadap prioritas belanja daerah.

Namun demikian, Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa keberhasilan pengelolaan APBD tidak hanya diukur dari tingginya persentase realisasi anggaran, tetapi juga dari kualitas belanja, efektivitas program, serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam aspek pendapatan daerah, kami melihat bahwa kemandirian fiskal masih perlu terus diperkuat. Struktur Pendapatan Asli Daerah masih didominasi oleh penerimaan pajak daerah, sementara kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta pemanfaatan aset daerah belum memberikan hasil yang optimal. Bahkan sebagian BUMD belum mampu memberikan dividen yang sebanding dengan penyertaan modal yang telah diberikan pemerintah daerah.

Oleh karena itu, kami memandang perlu adanya langkah-langkah pembenahan melalui optimalisasi pengelolaan aset, penguatan tata kelola BUMD, evaluasi terhadap BUMD yang tidak produktif, serta pengembangan sumber-sumber PAD baru sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dalam aspek belanja daerah, kami mengapresiasi tingkat realisasi yang telah mencapai hampir 95 persen. Akan tetapi, Badan Anggaran juga memberikan catatan penting bahwa proporsi belanja modal dan belanja infrastruktur pelayanan publik masih relatif rendah dibandingkan kebutuhan pembangunan daerah dan arah kebijakan nasional.

Pelaksanaan kegiatan yang masih terkonsentrasi pada triwulan akhir juga perlu menjadi perhatian agar kualitas pelaksanaan program semakin baik dan manfaat anggaran dapat lebih cepat dirasakan masyarakat.

Rapat Kerja Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa kualitas belanja harus terus diarahkan pada prinsip **money follow program**, yaitu memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar menghasilkan keluaran dan manfaat yang terukur, terutama pada sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, penanggulangan bencana, serta pelayanan publik yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.

Kami juga mencermati masih terdapat beberapa pekerjaan pembangunan yang belum dapat dimanfaatkan secara optimal meskipun telah menyerap anggaran yang cukup besar. Kondisi ini hendaknya menjadi bahan evaluasi bersama agar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan proyek pembangunan semakin efektif, tepat waktu, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Fraksi Partai Demokrat memberikan apresiasi terhadap berbagai capaian pembangunan daerah yang tetap dapat dipertahankan di tengah kondisi fiskal yang terbatas. Namun demikian, beberapa tantangan strategis tetap memerlukan perhatian berkelanjutan, antara lain penguatan kualitas pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan, pemerataan pembangunan infrastruktur, penguatan sektor pertanian, peningkatan daya saing investasi, optimalisasi pengelolaan BUMD, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kami meyakini bahwa keberhasilan pembangunan daerah ke depan akan sangat ditentukan oleh kemampuan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas perencanaan, memperkuat sinergi antarperangkat daerah, mempercepat pelaksanaan program, serta menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Fraksi Partai Demokrat juga menekankan pentingnya pelaksanaan seluruh rekomendasi DPRD sebagai bagian dari mekanisme **checks and balances** dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rekomendasi DPRD hendaknya tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi menjadi instrumen perbaikan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas kebijakan, dan penyempurnaan pelaksanaan APBD pada tahun-tahun berikutnya.

Rapat Kerja Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Dengan memperhatikan dinamika pembahasan Badan Anggaran DPRD, hasil pemeriksaan BPK, serta berbagai catatan yang telah disampaikan selama proses pembahasan Ranperda ini, **Fraksi Partai Demokrat pada prinsipnya dapat menerima dan menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,** disertai harapan agar seluruh rekomendasi DPRD menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan pembangunan pada masa yang akan datang.

Semoga sinergi yang telah terbangun antara Pemerintah Daerah dan DPRD senantiasa menjadi kekuatan dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, efektif, serta mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan Sumatera Barat dan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Kami berharap pandangan ini dapat menjadi masukan konstruktif bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menyempurnakan pelaksanaan APBD di masa yang akan datang, dengan semangat transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada rakyat.

Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi langkah-langkah kita dalam mewujudkan Sumatera Barat yang unggul, maju, dan sejahtera.

Billahi Taufiq Wal Hidayah.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Padang, 20 Juli 2026

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

DONI HARSIVA YANDRA, S.IP, M.E	**ALI MUDA, S.H.**
Ketua	**Sekretaris**

ANGGOTA FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

JEFFRI MASRUL, S.E.	Hj. AIDA, S.H.
BENNI SASWIN, S.E.	AGUS SYAHDEMAN, S.E.
Hj. YESI ENDRIANI, S.M.	H. GINNO IRWAN

FRAKSI PARTAI GERINDRA
(GERAKAN INDONESIA RAYA)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI GERINDRA

DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

TERHADAP RANPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN APBD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PEMBAHASAN AKHIR

SENIN, 20 JULI 2026

JURU BICARA : .....

Assalamualaikum Wr. Wb

Yang terhormat

- Sdr.Pimpinan dan Rekan-rekan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat
- Sdr.Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat
- Sdr. Pimpinan dan Anggota TAPD Provinsi Sumatera Barat
- Sdr.Sekretaris Daerah/Asisten/Badan/Dinas/Kantor/Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- Sdr.Pimpinan BUMN/BUMD/Perguruan Tinggi se-Sumatera Barat serta hadirin dan undangan yang kami muliakan

Peserta Rapat Kerja yang kami muliakan

Alhamdulilahirabbil a'lamin, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita semua hari ini, pada rapat hari ini, dalam rangka mendengarkan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025.

Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, kerabat, sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Bapak Ibu Hadirin yang Berbahagia

Sebagai akhir dari siklus pengelolaan keuangan daerah, maka Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan sarana untuk mengevaluasi dari keseluruhan tahapan pengelolaan keuangan daerah, untuk memastikan bahwa keuangan daerah telah digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan yang direncanakan, telah digunakan secara efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan sasaran yang akan dicapai, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Sesuai mekanisme, Sdr.Gubernur sebelumnya telah menyampaikan kepada DPRD Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. Fraksi-farksi juga telah menyampaikan Pandangan Umum yang kemudian telah dijawab pula oleh gubernur, sehingga hari ini kita mendengarkan Pendapat Akhir Fraksi sebelum proses pengesahan dan kesepakatan menjadi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025.

Bapak Ibu Hadirin yang Berbahagia..

Fraksi Partai Gerindra mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban ini merupakan wujud akuntabilitas kepada masyarakat sekaligus menjadi instrumen evaluasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.

Setelah mencermati laporan Badan Anggaran, hasil audit BPK, serta pembahasan bersama TAPD dan perangkat daerah, Fraksi menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

Pertama, mengenai pengelolaan pendapatan daerah

Realisasi pendapatan daerah mencapai sekitar 99 persen dari target, sedangkan realisasi belanja mencapai lebih dari 94 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara umum tata kelola fiskal daerah masih berjalan cukup baik di tengah berbagai tantangan, mulai dari kebijakan efisiensi nasional, perlambatan ekonomi, hingga bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir tahun 2025.

Namun demikian, capaian tersebut masih menyisakan berbagai persoalan mendasar. Realisasi PAD mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, sementara tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan masih berada pada kisaran 58 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya

intensifikasi dan ekstensifikasi pajak belum berjalan optimal. Ini juga menjadi indikator bahwa pelayanan perpajakan masih belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat.

Fraksi Partai Gerindra meminta Pemerintah Daerah melakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan perpajakan, memperkuat digitalisasi pelayanan Samsat, memperbanyak layanan jemput bola hingga ke pelosok daerah, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, potensi penerimaan dari Pajak Air Permukaan, Opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), maupun kendaraan non-BA yang beroperasi di Sumatera Barat masih belum tergarap maksimal.

Pada APBD Tahun 2026 ini, Pajak Air Permukaan target penerimaannya meningkat sangat signifikan. Tanpa pembenahan regulasi, pendataan objek pajak, peningkatan SDM, dan pengawasan yang kuat, target tersebut berpotensi tidak tercapai.

Kendaraan berpelat luar daerah yang beroperasi di Sumatera Barat juga masih menjadi kebocoran penerimaan pajak. Pemerintah harus memiliki keberanian menyusun kebijakan yang mendorong mutasi kendaraan operasional perusahaan, kendaraan pertambangan, perkebunan, serta angkutan logistik menjadi kendaraan berpelat BA.

Disisi lain, Penerimaan dari sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) masih sangat rendah dibandingkan potensi yang tersedia. Lemahnya pengawasan terhadap aktivitas pertambangan menyebabkan daerah kehilangan peluang peningkatan PAD yang cukup besar.

Kedua, mengenai pengelolaan aset dan BUMD.

Nilai aset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mencapai triliunan rupiah, namun kontribusinya terhadap PAD masih sangat kecil. Banyak aset belum dimanfaatkan secara produktif, sementara aset yang rusak berat masih tercatat tanpa penyelesaian yang jelas.

Demikian pula dengan kinerja BUMD. Hingga kini hanya sedikit BUMD yang mampu memberikan dividen secara signifikan. Sebaliknya, beberapa perusahaan daerah justru terus membebani keuangan pemerintah.

Fraksi Partai Gerindra berpendapat bahwa sudah saatnya dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh BUMD dengan indikator yang objektif. BUMD harus dikelola secara profesional, memiliki target bisnis yang jelas, diawasi secara ketat, dan apabila terus merugi tanpa prospek perbaikan maka pemerintah harus berani melakukan restrukturisasi bahkan likuidasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketiga, mengenai belanja daerah.

Fraksi Partai Gerindra mengapresiasi realisasi belanja daerah yang telah mencapai lebih dari 94 persen. Namun, besarnya SILPA dan surplus anggaran menunjukkan masih adanya kelemahan dalam perencanaan maupun pelaksanaan program.

Surplus memang memberikan ruang fiskal bagi APBD tahun berikutnya, namun di sisi lain menunjukkan masih adanya program yang terlambat dilaksanakan, tidak selesai, bahkan tidak memberikan manfaat optimal kepada masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada ketersediaan anggaran, melainkan pada kualitas perencanaan, pengadaan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.

Masih banyak kegiatan yang terlambat dilaksanakan, bahkan terdapat pekerjaan yang tidak selesai tepat waktu sehingga manfaat pembangunan belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.

Fraksi Partai Gerindra meminta agar seluruh OPD mempercepat proses pengadaan sejak awal tahun, memperbaiki manajemen proyek, meningkatkan kapasitas pejabat pengadaan, dan melakukan evaluasi berkala terhadap setiap kegiatan strategis sehingga keterlambatan pekerjaan tidak terus berulang.

Kami juga perlu menyoroti masih rendahnya proporsi belanja modal, khususnya pembangunan infrastruktur pelayanan publik. Pemerintah Daerah perlu secara bertahap memenuhi amanat peraturan perundang-undangan mengenai penguatan belanja infrastruktur agar pelayanan publik semakin berkualitas.

Keempat, mengenai pelayanan publik.

Fraksi Partai Geindra menilai, pembangunan daerah tidak cukup diukur dari besarnya serapan anggaran, tetapi dari kualitas manfaat yang diterima masyarakat.

Kami melihat, alokasi belanja modal masih belum memadai dibandingkan kebutuhan pembangunan daerah. Masyarakat masih menghadapi persoalan jalan provinsi yang rusak, irigasi yang belum optimal, serta berbagai infrastruktur pelayanan publik yang memerlukan peningkatan kualitas.

Karena itu, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan proporsi belanja modal secara bertahap agar memenuhi amanat peraturan perundang-undangan, sekaligus memperkuat pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya berorientasi pada proyek fisik, tetapi harus mampu mendorong produktivitas sektor pertanian, pariwisata, UMKM, perdagangan, dan konektivitas antarwilayah.

Selain itu, Fraksi Partai Gerindra masih menemukan berbagai persoalan pelayanan publik. Masih terdapat SMA dan SMK yang kondisinya kurang layak, sarana pendidikan belum memadai, fasilitas umum yang telah dibangun belum dimanfaatkan secara optimal, serta beberapa proyek strategis yang belum memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

Pemerintah Daerah harus memastikan bahwa setiap pembangunan benar-benar selesai, berfungsi, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, bukan sekadar menjadi aset yang tercatat dalam neraca pemerintah.

Kelima, mengenai tata kelola pemerintahan.

Fraksi Partai Geindra memberikan perhatian terhadap masih ditemukannya kelemahan administrasi sebagaimana menjadi temuan pemeriksaan, termasuk pembayaran belanja pegawai yang tidak sesuai ketentuan, pengelolaan aset yang belum optimal, serta masih besarnya piutang daerah.

Kami meminta seluruh OPD meningkatkan disiplin administrasi, memperkuat pengawasan internal, meningkatkan kualitas perencanaan, serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara tepat waktu dan tuntas.

Ke depan, Pemerintah Daerah juga harus memperkuat budaya pemerintahan yang berorientasi pada hasil, transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas.

Saudara Pimpinan Sidang yang kami hormati

Setelah mencermati semua proses pembahasan, Fraksi Partai Gerindra berkesimpulan bahwa secara umum pengelolaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 telah berjalan cukup baik. Hal ini tercermin dari tingginya realisasi pendapatan dan belanja daerah, meskipun masih terdapat berbagai kelemahan yang harus segera diperbaiki.

Fraksi Partai Gerindra memandang bahwa berbagai kelemahan tersebut tidak boleh dipandang sebagai hambatan, melainkan sebagai momentum untuk memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat kemandirian fiskal, meningkatkan efektivitas belanja daerah, mengoptimalkan pelayanan publik, serta mempercepat pembangunan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.

Atas dasar berbagai pertimbangan tersebut, serta dengan mengharapkan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi Badan Anggaran, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, serta berbagai masukan yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi DPRD, maka Fraksi Partai Gerindra menyatakan **MENERIMA DAN MENYETUJUI** Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Persetujuan ini kami berikan dengan harapan agar seluruh catatan, koreksi, dan rekomendasi yang telah disampaikan benar-benar menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan pada masa yang akan datang.

Wabillahitaufik wal hidayah.
Wassalamualaikum Wr. Wb
Salam Indonesia Raya !!!

FRAKSI PARTAI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua		Sekretaris
KHAIRUDDIN SIMANJUNTAK		MARIO SYAHJOHAN

FRAKSI PARTAI GERINDRA GERAKAN INDONESIA RAYA

Penasehat :

- Evi Yandri Rajo Budiman

Wakil Ketua : Verry Mulyadi, SH

Anggota:

1. Ade Putra
2. Dr.Ir.H.Indra Catri, MT
3. Jempol
4. Mukhlis Yusuf Abit, ST,MM
5. Nurkhalis Dt.Bijo Dirajo, S.Pt
6. Ronny Mulyadi Dt.Bungsu, SE

FRAKSI PARTAI GOLKAR
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 57591 -57592 – 57593 Fax. (0751) 443391 Padang 25133

Pendapat Akhir Fraksi Partai Golkar
DPRD Provinsi Sumatera Barat

Terhadap

Ranperda Provinsi Sumatera Barat
Tentang Pertanggungjawaban APBD 2025

Disampaikan pada Rapat Pembahasan Akhir
Dalam Rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi
Senin, 20 Juli 2026

Bismillahirahmanirrahim

Assamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Yth. Sdr. Gubernur Sumatera Barat,
Yth. Sdr. Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat,
Yth. Sdr. Anggota Forkopimda Provinsi Sumatera Barat,
Yth. Sdr. Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Badan/Dinas/Biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Yth. Sdr. Sekretaris DPRD beserta jajaran dan rekan-rekan wartawan serta Hadirin Undangan yang berbahagia.

Sdr. Gubernur, Pimpinan DPRD dan hadirin yang kami hormati.

Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Karunia Nya kepada kita semua sehingga dapat hadir pada kesempatan ini, untuk mengikuti Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025.

Shalawat beserta salam marilah pula kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman

jahiliyah kepada zaman yang terang benderang, penuh dengan kemajuan dan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita jalani saat ini..

Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan DPRD yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi Partai Golkar untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat ini.

Rasa terima kasih juga kami sampaikan kepada teman-teman fraksi Partai Golkar yang telah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai juru bicara untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Partai Golkar di dalam Rapat Paripurna ini. Semoga amanah dan kepercayaan yang diberikan ini dapat saya laksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Hadirin yang berbahagia.

Fraksi Partai Golkar setelah mencermati Hasil Pembahasan Badan Anggaran terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pertanggungjawaban APBD tahun Anggaran 2025, dimana tujuan dan sasaran dari pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui realisasi pendapatan, belanja dan SILPA dari pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.
2. Untuk mengetahui apakah Program, Kegiatan dan Anggaran yang ditampung dalam APBD Tahun 2025, telah digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, telah digunakan secara efektif dan efisien untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan.
3. Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam pelaksanaan program, kegiatan dan penggunaan anggaran yang terdapat dalam APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Hadirin yang kami muliakan.

Sebagaimana yang termaktub dalam Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 bahwa APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sebagaimana yang dituangkan dalam Perda Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dapat dilihat realisasi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Hadirin yang berbahagia.

Setelah Fraksi Partai Golkar ~~setel~~ah mencermati Hasil Pembahasan Badan Anggaran terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025, yang bertujuan untuk mengetahui realisasi pendapatan, belanja, SILPA, serta mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam mewujudkan target kinerja, maka izinkan kami menyampaikan catatan dan pandangan sebagai berikut.

Realisasi Pelaksanaan APBD Tahun 2025

Berdasarkan Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran, realisasi APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. **Pendapatan Daerah**: Terealisasi sebesar Rp 6.207.996.645.654,63 (99,03%), yang terdiri dari PAD sebesar Rp 2.763.868.829.028,63 (98,45%), Pendapatan Transfer sebesar Rp 3.405.275.915.726,- (99,60%), dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp 38.851.900.900,- (92,14%).
2. **Belanja Daerah**: Terealisasi sebesar Rp 6.041.051.585.846,25 (94,59%), yang terdiri dari Belanja Operasional sebesar Rp 4.392.082.462.719,12 (93,89%), Belanja Modal sebesar Rp 719.602.262.636,13 (92,59%), Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 5.222.259.811,30 (49,79%), dan Belanja Transfer sebesar Rp 922.244.038.928,- (99,99%).
3. **Pembiayaan Daerah**: Penerimaan pembiayaan terealisasi sebesar Rp 117.722.983.809,12 (99,99%).

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Hadirin yang berbahagia.

Merujuk pada Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran, terdapat surplus sebesar Rp 166.945.059.808,38 dan SILPA sebesar Rp 284.668.043.617,-. Angka SILPA yang cukup besar ini mengindikasikan perlunya optimalisasi kinerja OPD dalam merealisasikan program sesuai target yang telah ditetapkan.

Berikut adalah catatan kritis Fraksi Partai Golkar :

1. **Rendahnya Kepatuhan dan Optimalisasi Pendapatan Pajak.**

   Fraksi Partai Golkar sangat menyayangkan bahwa di tengah kebutuhan fiskal yang tinggi, kinerja Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hanya mencapai 97,06% akibat tingkat kepatuhan wajib pajak yang memprihatinkan, yakni baru menyentuh angka 58%. Lebih jauh lagi, realisasi Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang hanya sebesar 68,14% menjadi indikasi atau malah menjadi bukti lemahnya pengawasan di lapangan. Kami mendesak Pemerintah Daerah tidak sekadar mengejar target, tetapi memperbaiki kualitas pelayanan dan mempertegas regulasi bagi kendaraan Non-BA yang beroperasi di Sumatera Barat.

2. **Ketimpangan Alokasi Belanja Modal.**

   Fraksi Partai Golkar menilai bahwa alokasi belanja modal infrastruktur pelayanan publik masih sangat jauh dari amanat 40% sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2022. Ketimpangan ini secara langsung menghambat perbaikan infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi yang seharusnya menjadi prioritas pelayanan dasar bagi masyarakat. Berdasarkan data ini, Fraksi Partai Golkar meminta Pemerintah untuk mengupayakan dengan serius peningkatkan belanja modal infrastruktur ini agar pemenuhan kebutuhan infrastruktur terkait kebutuhan dasar masyarakat dapat terus ditingkatkan.

3. **Kegagalan Tata Kelola BUMD.**

   Penyertaan modal sebesar Rp 1,759 triliun terbukti belum menjadi instrumen pendapatan yang efektif. Ironisnya, di luar PT. Bank Nagari dan PT. Jamkrida, mayoritas BUMD kita justru membebani APBD karena terus-menerus merugi. Kami mendukung rekomendasi Badan Anggaran untuk melakukan langkah drastis yakni melakukan evaluasi total, penyehatan, hingga likuidasi bagi BUMD yang sudah tidak produktif dan tidak layak lagi dipertahankan.

4. **Manajemen Aset yang Belum Profesional.**

   Sangat ironis melihat aset Barang Milik Daerah (BMD) dengan nilai fantastis Rp 10,6 triliun, namun kontribusi penerimaannya hanya sebesar Rp 10,9 miliar. Kondisi ini menunjukkan bahwa aset daerah belum dikelola dengan orientasi bisnis yang profesional. Selain itu, pembiaran terhadap aset rusak berat senilai Rp 120,8 miliar yang belum dihapuskan hanya akan menjadi beban administrasi dan akuntansi yang tidak produktif.

5. **Mangkraknya Proyek Strategis.**

   Fraksi Partai Golkar menuntut pertanggungjawaban dan penyikapan konkret atas proyek-proyek strategis seperti *Main Stadium*, gedung MUI, dan pabrik pakan ternak yang telah menyedot anggaran besar namun belum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menjadikan *Main Stadium* sebagai monumen yang tidak aktif adalah bentuk pemborosan

sumber daya yang tidak dapat diterima oleh akal sehat rakyat Sumatera Barat.

6. **Lemahnya Disiplin Administrasi Pegawai.**

   Ditemukannya pembayaran gaji dan tunjangan kepada ASN yang sudah pensiun, sedang tugas belajar, hingga tumpang tindih TPP adalah bukti nyata lemahnya pengawasan internal. Kami meminta Sdr. Gubernur melakukan evaluasi tegas agar insiden serupa tidak terulang kembali di masa depan.

7. **Percepatan Eksekusi Anggaran.**

   Penumpukan realisasi kegiatan pada triwulan III dan IV menyebabkan kualitas pekerjaan berisiko rendah dan rentan putus kontrak. Pemerintah Daerah harus mengakhiri ketergantungan pada pendapatan bunga deposito sebagai "penyelamat" fiskal, dan menggantinya dengan percepatan eksekusi program sejak awal tahun sebagai stimulus nyata bagi perekonomian rakyat.

Berdasarkan hasil pembahasan Banggar tersebut, Fraksi Partai Golkar menyampaikan bahwa Fraksi Partai Golkar MENYATAKAN dapat MENERIMA DAN MENYETUJUI Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat, dengan catatan Fraksi Partai Golkar meminta Pemerintah Daerah untuk terus melakukan upaya perbaikan dalam menghadapi tantangan demi tantangan pada tahun anggaran berikutnya.

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Hadirin Yang Berbahagia.

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi Partai Golkar terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2025 ini.

Terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekhilafan.

Wabillahi Taufiq Walhidayah

Assalamulaikum WW.

Padang, 20 Juli 2026

Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sumatera Barat

Ketua	**Sekretaris**
(Yogi Pratama, SE)	**(Dra. Sitti Izzati Aziz)**

Juru Bicara

(Hj. Zaksai Kasni, S.E., M.M)

1. Zulkenedi Said, S.Sos,S.H.,M.Si.,M.M.,M.H.,M.AP (Wakil Ketua)
2. Zaksai Kasni, SE, MM (Bendahara)
3. M. Iqra Chissa Putra, S.ST, MM (Anggota)
4. H. Zuldafri Darma, SH (Anggota)
5. Drh. Nela Abdika Zamri, M.M., M.Si (Anggota)
6. Zarfi Deson, SH (Anggota)
7. H. Lazuardi Erman, S.H (Anggota)

FRAKSI PARTAI NasDem
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. (0751) 7057591 – 7057592 – 7057593 Fax (0751) 59328 Padang 25133

بسم الله الرحمن الرحيم

Pendapat Akhir
Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025

Disampaikan pada Rapat Kerja Pembahasan Akhir
Dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat
Senin, 20 Juli 2026

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yth. Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Yth. Pimpinan Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Yth. Kepala OPD di lingkungan Provinsi Sumatera Barat

Yth. Seluruh hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, ridho dan karunianya kepada kita dapat menghadiri Rapat Kerja Pembahasan Akhir pada hari ini.

Selanjutnya salawat beriring salam tidak lupa pula kita kirimkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah mengangkat derjat manusia menjadi insan kamil dimuka bumi ini, dan kehadiran beliau sebagai pembawa rahmat untuk sekalian alam.

Melalui kesempatan yang berbahagia ini izinkanlah kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada Saudara Pimpinan Sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Partai

NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Rapat Pembahasan Akhir Antara DPRD Sumbar dengan Pemerintah Daerah di ruang yang terhormat ini.

Dan secara pribadi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Fraksi Partai NasDem yang telah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai juru bicara, untuk menyampaikan Pendapat akhir Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025.

Pimpinan Dewan dan hadirin yang kami hormati

Fraksi Partai NasDem menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Anggota Badan Anggaran Provinsi Sumatera Barat beserta seluruh Komisi DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama dengan OPD terkait yang telah melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah diatas, semoga kerja keras tersebut akan menjadi amal shaleh serta memberikan kemaslahatan bagi kemajuan masyarakat Sumatera Barat.

Pimpinan Dewan, Saudara Gubernur dan hadirin yang kami hormati

Secara umum, Fraksi Partai NasDem mengapresiasi pelaksanaan APBD 2025 yang telah berjalan dengan berbagai tantangan eksternal maupun internal. Namun demikian, terdapat beberapa **catatan dan rekomendasi** yang perlu menjadi perhatian Bersama :

1) Fraksi Partai NasDem mengingatkan bahwa penyertaan modal daerah pada BUMD merupakan bentuk investasi publik yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kondisi beberapa BUMD yang tidak berkinerja baik dan terus mengalami kerugian tidak boleh dipandang sebagai kondisi yang normal.

   Pemerintah Daerah perlu melakukan evaluasi berbasis kinerja secara objektif terhadap seluruh BUMD, sehingga setiap rupiah penyertaan modal yang telah ditanamkan benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi daerah. Terhadap BUMD yang dalam jangka waktu tertentu tidak menunjukkan prospek perbaikan

yang jelas, perlu dipertimbangkan langkah restrukturisasi atau kebijakan lain yang lebih efektif untuk melindungi kepentingan keuangan daerah.

2) Pabrik pengolahan pakan ternak dan pengering jagung Kinali, yang telah dibangun menggunakan anggaran daerah merupakan barang milik daerah yang wajib diamankan, dipelihara, dimanfaatkan dan dioptimalkan untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat serta peningkatan nilai manfaat ekonomi daerah.

   Fraksi Partai NasDem berpendapat bahwa Pemerintah Provinsi Perlu untuk :

   a) Menyelesaikan kekurangan sarana dan prasarana yang masih diperlukan.
   b) Melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis, keuangan dan hukum.
   c) Menyusun studi kelayakan operasional dan bisnis.
   d) Menentukan model pengelolaan yang paling menguntungkan bagi daerah, termasuk opsi pengelolaan langsung, melalui pengelolaan UPTD-BLUD, maupun melalui BUMD.

3) Berkaitan dengan main stadion Fraksi Partai NasDem berpendapat bahwa dana yang telah ditanamkan selama ini harus dipandang sebagai investasi publik yang wajib diselamatkan. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil tidak boleh semata-mata berorientasi pada penyelesaian fisik 100 persen, tetapi harus diarahkan pada bagaimana aset tersebut dapat segera memberikan manfaat ekonomi, sosial, olahraga, dan pelayanan kepada masyarakat.

   Sehubungan dengan itu, Fraksi Partai NasDem mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan penataan status dan pengelolaan aset stadion sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemanfaatan tersebut perlu diarahkan untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah, sekaligus mengurangi beban biaya pemeliharaan yang selama ini ditanggung APBD.

4) Terkait pembangunan Zona B Gedung Kebudayaan Sumatera Barat, kami Fraksi Partai NasDem berpendapat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar :

a) Menyelesaikan seluruh permasalahan administrasi, hukum, dan teknis yang masih menjadi hambatan penyelesaian pembangunan Zona B.
b) Melakukan audit teknis independen terhadap kondisi bangunan yang telah terbangun guna memastikan keamanan, kualitas konstruksi, dan nilai manfaat aset.
c) Menyusun peta jalan (roadmap) penyelesaian pembangunan yang jelas, lengkap dengan kebutuhan anggaran, sumber pendanaan, dan target waktu penyelesaian.

5) Fraksi Partai NasDem meminta kepada OPD yang berkaitan langsung dengan kegiatan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), agar melengkapi sarana dan prasarana yang ada di tingkat operasional, sehingga potensi PAD dapat di optimalkan.
6) Fraksi Partai NasDem mengingatkan OPD agar segera mempercepat proses pelaksanaan program yang menyentuh kehidupan masyarakat, karena menyerap tenaga kerja dan juga terjadinya pergerakan ekonomi di tengah-tengah masyarakat.
7) Kualitas Belanja dan Serapan Anggaran, Kami mencatat bahwa serapan anggaran tahun 2025 secara kuantitatif telah memenuhi target, namun secara kualitatif masih terdapat ketidakseimbangan antara belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja pembangunan yang menyentuh masyarakat harus ditingkatkan efektivitas dan dampaknya. Kami mendorong agar belanja ke depan lebih diarahkan pada program yang produktif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
8) Tindak Lanjut Temuan BPK

   Fraksi Partai NasDem menegaskan pentingnya keseriusan Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti seluruh temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Meskipun opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

kembali diraih, hal tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan berbagai catatan penting yang masih ditemukan.

Kami mencermati bahwa beberapa temuan BPK merupakan temuan berulang dari tahun-tahun sebelumnya, seperti kelemahan pengendalian intern, ketidaktepatan belanja, kekurangan volume pekerjaan, hingga aset yang belum tertib secara administrasi. Hal ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan belum dilakukan secara sistemik dan menyeluruh.

Fraksi Partai NasDem mendorong agar seluruh perangkat daerah, terutama yang menjadi objek temuan, menyusun rencana aksi tindak lanjut yang terukur, disertai batas waktu penyelesaian, dan dilaporkan secara transparan kepada publik dan DPRD. Penanganan temuan harus dilakukan tidak hanya secara administratif, tetapi juga menyentuh aspek akuntabilitas dan disiplin anggaran.

Kami juga mendukung peran aktif Inspektorat Daerah sebagai pengawas internal untuk melakukan pendampingan sekaligus pengawasan intensif atas pelaksanaan APBD ke depan. Ketegasan terhadap pelanggaran pengelolaan keuangan daerah juga perlu ditegakkan, agar tidak menciptakan toleransi terhadap praktik yang merugikan keuangan daerah.

Pimpinan Dewan dan hadirin yang kami hormati

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami Fraksi Partai NasDem dengan ini **menyetujui** Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025 **dijadikan sebagai Peraturan Daerah** Provinsi Sumatera Barat.

Demikianlah Pendapat Akhir dari Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat yang dapat kami sampaikan dalam Pembahasan Akhir Antara DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Daerah, jika ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kami mohon maaf dan kepada Allah jua kita mohon ampun.

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah

وَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Padang, 20 Juli 2026

H. Irwan Zuldani, SE.,MM
Juru Bicara

Fraksi Partai NasDem
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sumatera Barat

Ketua,	**Sekretaris,**
Endarmy	**Erick Hamdani, SE Dt. Ambasa**

Fraksi NasDem
Dewan Pimpinan Rakyat Daerah
Provinsi Sumatera Barat

Anggota Fraksi Partai NasDem DPRD Prov. Sumbar

Ketua	: Endarmy
Wakil Ketua	: H. Abdul Rahman
Sekretaris	: Erick Hamdani, SE Dt. Ambasa
Anggota	: Nanda Satria, S.IP
	H. Irwan Zuldani, SE.,MM
	Asril, SE
	Salamat Simamora, SE.,M.Si
	H. Ilson Cong, SE.,MM Dt. Mongguang
	Bakri Bakar

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
JL.KHATIB SULAIMAN NO.87 (0751) 7057591-7057592-7057593 FAX (0751)59238 PADANG

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAREAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Disampaikan oleh : Hendra Halim
Tanggal : 20 Juli 2026

Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh

Yang Terhormat, Saudara Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat

Yang Terhormat, Saudara Ketua, Wakil wakil Ketua dan Rekan-Rekan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat

Yang Terhormat, Saudara Pimpinan PT. Bank Nagari, Pimpinan BUMD

Yang Terhormat, Saudara Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Pimpinan OPD di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Rekan-rekan Wartawan, Para Undangan, dan Hadirin yang Kami Muliakan.

Saudara Gubernur, Pimpinan dan Hadirin yang Kami Hormati....

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka menyampaikan Pendapat Akhir terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW.

Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan DPRD yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi Partai Amanat Nasional untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat ini. Rasa terima kasih juga kami sampaikan kepada rekan-rekan Fraksi Partai Amanat Nasional yang telah memberikan amanah kepada saya sebagai juru bicara untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Partai Amanat Nasional pada Rapat Paripurna ini. Semoga amanah dan kepercayaan yang diberikan ini dapat saya laksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Hadirin yang Kami Hormati,

Fraksi Partai amanat Nasioanl Setelah mencermati Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama TAPD dan OPD terkait, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ingin menyampaikan beberapa catatan penting, pemikiran, serta rekomendasi strategis terhadap pelaksanaan APBD Tahun 2025 sebagai berikut:

I. CATATAN PENDAPATAN DAERAH

1. **Optimalisasi Pajak Daerah:** Fraksi PAN menyoroti kinerja pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang belum maksimal (97,06%) akibat rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak yang baru menyentuh 58%. Kami mendesak Bapemda untuk merealisasikan komitmen peningkatan kepatuhan hingga 70% pada tahun 2026 melalui penambahan sarana Samsat Keliling dan peningkatan kualitas SDM. Selain itu, regulasi tegas terhadap kendaraan Non-BA (terutama angkutan batu bara dan sawit) untuk segera dimutasikan harus dikawal secara serius.

2. **Pengawasan Opsen MBLB:** Realisasi Opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang sangat rendah (68,14%) mencerminkan lemahnya pengawasan. Fraksi PAN meminta Pemerintah Provinsi meningkatkan kerja sama pengawasan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota agar potensi riil sektor ini tidak bocor.
3. **Pajak Air Permukaan (PAP):** Mengingat target PAP pada APBD 2026 melonjak sangat besar hingga Rp594 Miliar, Fraksi PAN menegaskan agar Biro Hukum dan OPD terkait segera merampungkan seluruh regulasi, sarana prasarana, serta gencar melakukan sosialisasi demi menghindari kegagalan target yang akan mengganggu postur fiskal daerah.
4. **Evaluasi Total BUMD:** Fraksi PAN merasa prihatin atas kinerja hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dari total investasi Rp1,75 Triliun, kontribusi deviden praktis hanya disumbangkan oleh PT Bank Nagari dan PT Jamkrida, sementara BUMD lainnya (seperti PT Grafika, PT Balairung, dll) terus merugi. Kami merekomendasikan peninjauan ulang yang radikal: kembangkan core bisnis yang potensial seperti mengubah PT Grafika menjadi BUMD Agro, dan **segera likuidasi BUMD yang sudah tidak layak dan terus merugi.**

II. CATATAN BELANJA DAERAH

1. **Pemenuhan Mandat Infrastruktur Pelayanan Publik:** Fraksi PAN mengingatkan Pemerintah Daerah untuk konsisten mematuhi amanat UU Nomor 1 Tahun 2022. Alokasi belanja jalan, jaringan, dan irigasi tahun 2025 yang hanya sebesar Rp354,8 Miliar masih jauh di bawah target mandatory 40%. Perbaikan kualitas perencanaan harus dilakukan agar target ini tercapai secara bertahap pada tahun 2027.
2. **Kecermatan Belanja Pegawai:** Adanya sisa belanja pegawai sebesar Rp177,3 Miliar dan temuan LHP BPK terkait pembayaran gaji/tunjangan kepada ASN pensiun, tugas belajar, serta TPP tumpang tindih menunjukkan ketidakcermatan

administrasi. Fraksi PAN meminta Gubernur melakukan evaluasi ketat terhadap sistem manajemen kepegawaian agar kesalahan ini tidak berulang.

3. **Penyelesaian Proyek Mangkrak:** Kami mendesak Pemerintah Daerah segera menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur berskala besar yang telah menyedot anggaran daerah namun belum bisa dimanfaatkan masyarakat, seperti *Main Stadium*, Gedung MUI, dan Pabrik Pakan Ternak. *Main Stadium* harus dihidupkan dengan berbagai event olahraga.
4. **Rehabilitasi Sarana Pendidikan:** Fraksi PAN meminta perhatian serius terhadap kondisi fisik bangunan SMA/SMK di kabupaten/kota yang tidak layak serta toilet sekolah yang sudah dibangun namun belum difungsikan. Pendidikan adalah investasi masa depan yang tidak boleh diabaikan sarana prasarananya.
5. **Pola Realisasi Anggaran:** Kebiasaan menumpuk pelaksanaan kegiatan di Triwulan III dan IV harus dihentikan karena berisiko tinggi terhadap putus kontrak. Percepatan tender di awal tahun wajib dilaksanakan agar APBD dapat menjadi stimulus pergerakan ekonomi masyarakat secara riil, bukan sengaja didepositokan demi mengejar pendapatan bunga.

III. SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA)

Fraksi PAN mencatat realisasi SILPA tahun 2025 mencapai Rp. 284.668.043.617,50. Di satu sisi, surplus ini memberikan fleksibilitas dan ruang fiskal yang cukup besar bagi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Namun di sisi lain, tingginya angka ini merefleksikan adanya efisiensi kontraktual sekaligus adanya program-program yang tidak terlaksana atau tidak tuntas. Kami berharap ruang fiskal ini nantinya dialokasikan secara proporsional untuk belanja modal yang menyentuh kepentingan langsung masyarakat.

Hadirin rapat Dewan yang berbahagia....

Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, setelah melakukan kajian mendalam terhadap Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran dan demi kepentingan pembangunan masyarakat Sumatera Barat, **Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan MENERIMA dan MENYETUJUI** Ranperda

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dengan catatan seluruh rekomendasi dan koreksi dalam pandangan akhir ini dapat ditindaklanjuti secara serius oleh Saudara Gubernur beserta jajaran OPD.

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi PAN ini kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya.

Billahitaufiq Wal Hidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Padang, 20 Juli 2026

Fraksi PAN DPRD Provinsi Sumatera Barat

Muhayatul, S.E., M.Si	**H.Daswanto, S.E**
Ketua	**Sekretaris**

H. INDRA DT RAJO LELO, SH., MM	**: PENASEHAT FRAKSI**
MUHAYATUL, SE,M.Si	**: KETUA FRAKSI**
H. MUZLI M.NUR, S.PD	**: WAKIL KETUA FRAKSI**
H. DASWANTO, SE	**: SEKRETARIS FRAKSI**
LASTUTI DARNI, S.Pd	**: BENDAHARA FRAKSI**
HENDRA HALIM	**: ANGGOTA FRAKSI**
RIDWAN DT TUMBIJO	**: ANGGOTA FRAKSI**
H. MASRISAL, SH	**: ANGGOTA FRAKSI**

FRAKSI PDI PERJUANGAN & PKB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jln. Khatib Sulaiman No.87 Telp. (0751)443391,7059325,7059328 Fax.(0751) 443391 - 7059325 Padang 25133
http://www.dprd-sumbarprov.go.id

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PDI PERJUANGAN DAN PKB
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP RANPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,
Salam Sejahtera bagi kita sekalian

Merdeka!!!

- **Yth. Sdr. Gubernur Sumatera Barat**
- **Yth. Sdr. Ketua Dan Wakil-Wakil Ketua Serta Rekan-Rekan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat**
- **Yth. Sdr. Pimpinan PT. Bank Nagari, Pimpinan BUMD**
- **Yth. Sdr. Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Pimpinan OPD Dilingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat**
- **Yang Terhormat Sekretaris Dewan Beserta Jajaran**
- **Yth. Rekan-rekan Wartawan, Undangan dan Hadirin Yang Kami Muliakan**

Terimakasih kepada Pimpinan Rapat Kerja Pembahasan Akhir dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, atas kesempatan yang diberikan kepada Fraksi PDI Perjuangan dan PKB untuk menyampaikan pendapat akhirnya.

Seizin Pimpinan Rapat Kerja ini kami mengajak kita semua untuk bersama-sama memanjatkan puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan seizin-Nya kita dapat menghadiri dan melaksanakan Rapat pagi ini dalam keadaan sehat wal'afiat. Selanjutnya Shalawat dan salam mari kita sama-sama sanjungkan

kearwah nabi besar kita, Muhammad SAW junjungan alam pembawa perubahan, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju sinar kemajuaan-minazzulumati ilannur sebagaimana yang kita rasakan hari ini, serta selalu kita dambakan safaatnya.

Hadirin yang kami muliakan

Kita sangat menyadari bahwa pembahasan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 bukanlah sekadar proses administratif dan formalitas konstitusional saja tetapi Pertanggungjawaban APBD merupakan bagian penting dari siklus pengelolaan keuangan daerah yang harus dimaknai sebagai instrumen evaluasi terhadap sejauh mana kebijakan anggaran telah dilaksanakan, target-target pembangunan telah dicapai, serta manfaat pembangunan telah dirasakan oleh masyarakat Sumatera Barat, untuk itu izinkanlah Fraksi PDI Perjuangan dan PKB menyampaikan hal- hal berikut sebagai pendapat akhir Fraksi kami :

1. Dapat kita pahami bahwa APBD hakikatnya adalah uang rakyat yang dihimpun melalui berbagai sumber penerimaan daerah dan kemudian dialokasikan kembali untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta membiayai Pembangunan, dalam hal ini Fraksi PDI Perjuangan dan PKB sangat menyadari bahwa setiap dana yang dibelanjakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil seperti yang kita bahas beberapa waktu yang lalu dan rapat hari ini sebagai akhir dari siklus pengelolaan keuangan daerah.

2. Ucapan terimaksih Fraksi kami kepada rekan-rekan Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat, beserta TAPD yang telah berusaha maksimal merampungkan Ranperda tentang Pertanggunjawaban APBD Tahun 2025 ini dengan baik.

3. **Gambaran Umum Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.**

Fraksi PDI Perjuangan dan PKB memberikan catatan sekaitan laporan Banggar bahwa secara umum penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun anggaran 2025 telah berjalan dengan baik, sebagaimana di sampaikan dalam laporan Banggar : *terutama pada capaian realisasi pendapatan dan belanja daerah pada Tahun 2025 tersebut,* ***dapat disimpulkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah telah berjalan dengan baik.*** *Meskipun target pendapatan daerah belum tercapai secara keseluruhan, tetapi dengan kebijakan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan belanja, diakhir tahun* ***terdapat surplus dengan nilai sebesar Rp. 166.945.059.808,38.***. catatan Fraksi kami adalah surplus sebesar Rp. 166.945.059.808,38 ini tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai keberhasilan atau efisiensi anggaran, karena adanya sisa anggaran akibat program dan kegiatan yang tidak terlaksana atau tidak terealisasi secara optimal ***maka menurut kami ini adalah silpa,*** dan harus menjadi evaluasi kedepannya terhadap kualitas perencanaa dan pelaksanaan APBD kenapa bisa terjadi sebesar ini ?

4. **Tentang Pendapatan Daerah,**

a. **Pendapatan Asli Daerah,** di dalam laporan Banggar dibunyikan *; target PAD ditetapkan pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp.2.807.443.163.516,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.763.868.829.028,- atau 98.45 %, Capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut, lebih rendah dari realisasi Tahun 2024 yang mencapai Rp. 2.942.563.617.866,- atau berkurang sebesar Rp. 178.694.788.837,57. Faktor utama yang menyebabkan penurunan tersebut adalah karena mulai Tahun 2025 bagi hasil untuk Kabupaten/Kota Sudah dipungut langsung oleh Kabupaten/Kota melalui Opsen PKB dan BBNKB sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor*

1 Tahun 2022. Fraksi PDI Perjuangan dan PKB akan hal ini berpendapat, bahwa didalam merencankan PAD masih terjadi apa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya Fraksi kami berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kedepannya agar terus berupaya meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui **optimalisasi Pendapatan Asli Daerah**, serta perlu mengembangkan sumber-sumber pendapatan baru melalui optimalisasi aset daerah, peningkatan kinerja BUMD, pengembangan pariwisata yang saat ini masih terasa lamban, penguatan sektor ekonomi kreatif yang kami rasakan belum mendapatkan tempat dalam pemasarannya, serta pengembangan potensi kelautan dan perikanan.

b. Fraksi PDI Perjuangan setuju dengan rekomendasi Banggar tentang kinerja dalam pengelolaan pajak daerah pada tahun 2025 yang terdiri dari 6 (enam) untuk dapat meningkatkan penerimaannya ke depan, diantaranya *Mendorong Pemerintah Daerah menyiapkan regulasi yang tepat dan membuat kebijakan yang mengikat terhadap kendaraan Non BA yang beroperasi di wilayah Provinsi Sumatera Barat, terutama angkutan batu bara, angkutan sawit, kendaraan operasional proyek dan kendaraan yang digunakan di sektor pertambangan, agar di mutasikan ke wilayah Kepolisian Sumatera Barat, termasuk membangun kerjasama dengan showroom kendaraan bermotor untuk mewajibkan mutasi bagi kendaraan Non BA atas transaksi jual beli kendaraan yang dilakukannya.*

c. Masalah BUMD, sebagaimana di dalam laporan Banggar *Dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 139.682.145.880,- realisasinya hanya sebesar Rp. 126.838.893.909,- dan itupun hanya* ***disumbangkan oleh 2 (dua) BUMD yaitu dari PT. Bank Nagari sebesar Rp. 122.188.355.229,- dan PT. Jamkrida sebesar Rp. 4.650.538.680,-.*** *Sedangkan BUMD*

dan Perseroan Terbatas lainnya yang menerima penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu PT. Grafika, PT. Balairung Jaya Sumbar, PT. Askrida, PT. Sijunjung Sumbar Energi, PT. Pembangunan Sumbar Sdak memberikan deviden oleh karena merugi. Untuk Persoalan BUMD ini Fraksi kami memandang kondisi ini harus menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, karena penyertaan modal daerah merupakan investasi yang bersumber dari uang rakyat harus memberikan manfaat yang jelas bagi daerah, jika tidak dapat memberikan/menghasilkan keuntungan/tidak memberikan dividen, bahkan terus mengalami kerugian maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai pemegang saham harus mengambil langkah yang lebih tegas dan apakah perusahaan tersebut masih layak dipertahankan? Pernyataan Fraksi kami ini sudah berulang kali kami sampaikan disetiap pembahasan BUMD.

d. Fraksi PDI Perjuangan dan PKB setuju dengan rekomendasi Banggar sebanyak 5 (lima) terhadap kinerja dalam pengelolaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut, diantaranya : *Meninjau kembali keberadaan BUMD-BUMD yang sudah tidak layak dan terus merugi. Apabila tidak mungkin bisa diperbaiki kembali kinerja BUMD tersebut, sebaiknya dilikuidasi saja serta meninjau kembali penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Askrida*

e. Fraksi kami memberikan perhatian serius terhadap masih terdapatnya piutang daerah dalam Neraca Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, sebagaimana disampaikan dalam Laporan Banggar bahwa *Dalam Neraca Daerah Tahun2025, terdapat piutang pajak daerah sebesar Rp. 66.777.367.157,- piutang restribusi daerah sebesar Rp. 7.329,884.059,- piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar*

Rp. 116.028.563.607,- dan piutang Lain-Lain PAD sebesar Rp. 881.390.796,- Badan Anggaran mendorong Pemerintah Daerah untuk dapat menagih piutang tersebut atau menghapuskannya apabila sudah Sdak mungkin ditagih lagi. Untuk ini Fraksi kami memberikan pendapat serta catatan bahwa piutang tersebut pada hakikatnya merupakan potensi penerimaan daerah yang belum terealisasi dan seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan serta pelayanan publik selain itu Fraksi kami juga memahami bahwa tidak seluruh piutang memiliki tingkat kemungkinan tertagih yang sama, oleh karena itu diperlukan pengelolaan piutang yang lebih tertib dan berbasis pada data yang akurat.

5. **Tentang Belanja Daerah**

a. Belanja Daerah disediakan sebesar Rp. 6.386.298.937.511,43,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.041.051.585.846,25,- atau 94.59 %, Fraksi kami memandang bahwa realisasi belanja daerah sebesar 94,59% tingkat penyerapan yang cukup baik, namun angka ini belum sepenuhnya menggambarkan keberhasilan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, karena terdapat sisa belanja sebesar Rp. 345.247.351.665,18.- yang merupakan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran, juga adanya anggaran yang tidak terserap karena terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan/tidak tuntas pelaksanaannya seperti dalam Laporan Banggar, Fraksi kami mengingatkan bahwa efisiensi anggaran dan kegagalan pelaksanaan/belum tuntas kegiatan sangatlah berbeda kedepan jika terjadi hal yang sama Fraksi kami meminta Pemerintah Daerah Sumatera Barat untuk menyampaikan daftar kegiatan yang tidak terlaksana/tidak tuntas, beserta alasan, nilai anggaran, target yang tidak tercapai, serta dampaknya terhadap masyarakat.

b. Fraksi PDI Perjuangan dan PKB setuju dengan rekomendasi Banggar sebanyak 5 (lima) diantarnya *Meminta kepada*

Pemerintah Daerah dan OPD-OPD untuk ***percepatan pelaksanaan kegiatan di awal tahun anggaran****, agar APBD dapat memberikan stimulus untuk pergerakan perekonomian daerah dan masyarakat dan tidak menjadikan pendapatan bunga deposito sebagai upaya untuk mendapatkan tambahan pendapatan.*

c. Kami memberikan perhatian serius terhadap masih rendahnya alokasi belanja modal dan pembangunan infrastruktur pelayanan publik. Masyarakat lebih membutuhkan jalan provinsi yang mantap, irigasi yang berfungsi, sekolah yang layak, rumah sakit yang berkualitas, serta infrastruktur dasar lainnya dibandingkan belanja yang kurang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.

6. Tentang Pembiayaan Daerah

Rencana penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 117.734.953.995,43, Realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 117.722.983.809,12, Selisih sekitar Rp. 11.970.186,31, Capaian sekitar 99,99%, terhadap hal ini, Fraksi kami memberikan apresiasi dengan tetap mengingatkan pentingnya pengelolaan pembiayaan secara hati-hati dan berkelanjutan. Dalam Laporan Banggar menyampaikan *Dari capaian realisasi pendapatan sebesar Rp. 6.207.996.645.654,63,- dan realisasi belanja sebesar Rp. 6.041.585.846,25,- dan penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 117.722.983.809,12,-, maka SILPA dari APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 284.668.043.617,50,* bagi Fraksi kami memandang bahwa SILPA sebesar Rp. 284.668.043.617,50 merupakan angka yang cukup signifikan dan perlu mendapat perhatian serius, kenapa hal ini Fraksi kami sampaikan, karena ada pertanyaan **apakah SILPA ini terbentuk karena adanya penghematan dalam pelaksanaan kegiatan, terbentuk karena program tidak terlaksana/kegiatan tidak tuntas**, jika silpa terbentuk karena program tidak terlaksana/kegiatan tidak tuntas maka harus menjadi bahan

evaluasi terhadap kualitas perencanaan dan pelaksanaan APBD, dan catatan Fraksi kami untuk dapat dipahami oleh Pemerintah Daerah Sumatera Barat; kenapa ada silpa sebesar ini? Program-program atau kegiatan-kegiatan apa saja yang tidak terlaksana ? Kenapa tidak terlaksana ? Dan ini harus menjadi evaluasi kedepannya terutama terhadap program-program dan kegiatan tersebut.

7. Dari semua rekomendasi serta Catatan-catatan dari Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sebanyak 27 poin, Fraksi PDI Perjuangan dan PKB menyetujui untuk diteruskan ke Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan meminta agar menjadikan setiap rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Anggaran DPRD sebagai agenda prioritas yang wajib ditindaklanjuti secara nyata, bukan sekadar menjadi catatan administratif dari tahun ke tahun

8. Catatan Fraksi PDI Perjuangan dan PKB untuk OPD, Fraksi kami memandang bahwa perlu ada evaluasi terhadap kinerja OPD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, karena OPD sebagai pelaksana program pembangunan harus mampu menunjukkan tingkat penyerapan anggaran, serta hasil dan manfaat dari anggaran yang dibelanjakan. OPD yang rendahnya serapan anggaran tidak terlaksana/tidak selesai/atau tidak mencapai target yang telah ditetapkan perlu dilakukan evaluasi. Kedepan, penilaian kinerja OPD harus lebih berorientasi pada hasil dan manfaat bagi masyarakat, bukan hanya secara administratif, tetapi juga secara substantif melalui hasil pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sdr. Pimpinan dan rekan-rekan anggota Dewan yang terhormat, serta para hadirin yang berbahagia.

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan dan PKB terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 yang dapat kami sampaikan. Berbagai catatan, pandangan dan kritik yang disampaikan Fraksi kami adalah merupakan bentuk tanggung jawab konstitusional DPRD dalam menjalankan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Fraksi kami berharap seluruh catatan dan rekomendasi yang telah disampaikan tidak berhenti sebagai bagian dari proses pembahasan pertanggungjawaban APBD, tetapi benar-benar ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai bahan perbaikan dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD pada tahun-tahun berikutnya, Fraksi PDI Perjuangan dan PKB menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, akhirnya kami ucapkan terimaksih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan

Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamith Thariq
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Padang, 20 Juli 2026

PIMPINAN FRAKSI
PDI PERJUANGAN & PKB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Albert Hendra Lukman,SE	**Donizar**
Ketua	Sekretaris

Juru Bicara

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
Jl. Khatib Sulaiman No 87 Padang Utara

PANDANGAN AKHIR

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

DPRD PROPINSI SUMATERA BARAT

TERHADAP

RANPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yth : Saudara Gubernur Provinsi Sumatera Barat
Yth : Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat
Yth : Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
Yth : Saudara Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat
Yth : Saudara-saudara anggota Forum komunikasi pimpinan daerah Serta Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat
Yth : Saudara Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat
Yth : Saudara Staf Ahli Gubernur, Kepala Dinas, Badan, Kantor,Pimpinan BUMN dan BUMD, Pimpinan Ormas, Partai Politik, LSM, wartawan dan seluruh hadirin yang berbahagia.

Saudara Gubernur, Pimpinan, Anggota Dewan Dan Hadirin Yang Berbahagia

Sebagai wujud rasa syukur kita atas nikmat Allah *Azza wa Jalla Tuhan Yang Maha Esa*, kita memuji dan memujaNya karna telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita sekalian, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini pada acara rapat paripurna penyampaian Pandangan akhir Fraksi-Fraksi DPRD Propinsi Sumatera Barat tentang RANPERDA

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025.

Sebelum memulai pandangan akhi, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat atas keberhasilannya menempati peringkat keenam secara nasional dalam capaian Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2025 dengan skor 77,27. Capaian ini mencerminkan adanya kemajuan dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia, khususnya pada aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup masyarakat. Prestasi tersebut harus terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui program yang tepat sasaran, pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Sumatera Barat.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera juga menyampaikan apresiasi kepada Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, organisasi perangkat daerah, serta seluruh pihak yang telah membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan bagian akhir dari siklus pengelolaan keuangan daerah. Dokumen Pertanggungjawaban ini tidak hanya menyajikan realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan, dan sisa anggaran. Pertanggungjawaban APBD juga menjadi instrumen untuk menilai kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan, pencapaian target kinerja, kepatuhan terhadap peraturan, serta manfaat anggaran bagi masyarakat.

Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kepala daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh

Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kewajiban ini bertujuan menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memandang APBD sebagai amanah rakyat yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, setiap rupiah anggaran harus dikelola secara tertib, transparan, efektif, efisien, dan berkeadilan. APBD harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat, memperkuat pelayanan dasar, memperbaiki infrastruktur, menurunkan kemiskinan, membuka kesempatan kerja, melindungi kelompok rentan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Saudara Gubernur, Pimpinan, Anggota Dewan Dan Hadirin Yang Berbahagia

Setelah mencermati laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan pandangan sebagai berikut:

1. **Optimalisasi pendapatan daerah**

   Fraksi PKS mengapresiasi capaian realisasi Pendapatan Daerah yang mencapai Rp6,2 triliun atau 99,03% dari target sebesar Rp6,27 triliun. Capaian ini menunjukkan kinerja pendapatan yang telah baik. Namun demikian, Fraksi PKS mencermati bahwa selisih realisasinya dari target mencapai Rp. 60,5 milyar. Pendapatan Asli Daerah terealisasi sebesar 2,7 triliun atau 98,45 persen. Capaian ini lebih rendah dibanding realisasi pendapatan transfer sebesar 3,4 triliun atau 99,6 persen. Begitupula komposisi realisasi PAD sebesar 44,5 persen dibandingkan sekitar 55,5 persen berasal dari dana transfer.

Berdasarkan data atas capaian ini, Fraksi PKS terus mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk terus memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Optimalisasi sumber-sumber pendapatan perlu dilakukan secara berkelanjutan dalam memperkuat kemandirian fiskal sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap transfer keuangan dari pemerintah pusat. Sebagaimana yang telah diinisiasi dengan terobosan melalui Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp. 12 Milyar, yang harus dioptimalkan pada tahun anggaran 2026 ini, disamping optimalisasi pajak daerah lainnya maupun retribusi daerah. Selain itu perlu juga di dorong peningkatan PAD melalui optimalisasi potensi ekonomi, pengelolaan aset, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan perbaikan kinerja BUMD.

2. Berkaitan dengan belanja daerah

Fraksi PKS mencermati realisasi Belanja Daerah sebesar Rp6,04 triliun atau 94,6 persen dari target. Anggaran belanja yang tidak terealisasi mencapai Rp345,25 miliar. Kami memberikan perhatian pada Belanja Modal yang hanya terealisasi 92,59%. Hal ini menunjukkan sangat diperlukannya keseriusan yang lebih tinggi dalam peningkatan kinerja terkait belanja. Mulai dari perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, dan pengawasan program agar anggaran yang telah dialokasikan dapat lebih optimal diterjemahkan menjadi pelayanan publik dan pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Berdasarkan pendapatan dan belanja daerah ini, Fraksi PKS berpandangan bahwa keberhasilan pengelolaan APBD tidak hanya diukur dari tingginya realisasi pendapatan, tetapi juga dari kualitas

penyerapan belanja yang mampu menghasilkan output, dampak, dan manfaat nyata dan luas bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan anggaran ke depan harus semakin realistis, terukur, dan berbasis kinerja yang berdampak.

3. Pembenahan Pajak dan Retribusi Daerah

Fraksi mengapresiasi realisasi Pajak Daerah yang mencapai Rp2,056 triliun atau 97,06% dari target Rp2,118 triliun. Capaian ini menunjukkan kinerja pemungutan pajak yang telah baik. Namun demikian, masih terdapat potensi penerimaan sekitar Rp62,19 miliar yang belum dapat direalisasikan dan perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah.

Fraksi PKS juga mencermati adanya variasi kinerja yang tajam antarjenis pajak. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berhasil melampaui target dengan realisasi 114,59%, sedangkan beberapa jenis pajak masih berada di bawah target, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (95,70%), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (94,70%), Pajak Rokok (94,70%).

Sejumlah sumber pajak membutuhkan perhatian yang lebih serius. Sumber pajak baru yang telah kita inisiasi bersama berupa Pajak Air Permukaan memiliki realisasi 83,1 persen. Keseriusan kita Bersama terhadap inisiatif Pajak Air Permukaan ini semakin diuji dan harus ditunjukkan pada tahun anggaran 2026 ini. Terlebih lagi keseriusan kita terhadap Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang hanya mencapai 68,14%. Bahkan Pajak Alat Berat belum terealisasi sama sekali dari target Rp2 miliar.

Untuk itu, Fraksi PKS meminta Pemerintah Provinsi melakukan evaluasi terhadap penyebab rendahnya realisasi pada jenis-jenis pajak tersebut, baik yang disebabkan oleh penetapan target, kepatuhan wajib

pajak, maupun efektivitas pengawasan dan pemungutan. Optimalisasi PAD tidak cukup hanya mengandalkan kenaikan tarif, tetapi harus ditempuh melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, digitalisasi pelayanan, dan penguatan pengawasan agar penerimaan daerah semakin berkelanjutan.

Retribusi Daerah

Fraksi PKS memberikan apresiasi terhadap capaian PAD dari Retribusi Daerah yang realisasinya mencapai Rp. 440 milyar atau 113,8 persen. Kinerja ini berasal dari Retribusi Pelayan Kesehatan yang mencapai realisasi Rp. 430 Milyar atau kontribusinya lebih 95 persen dari Retribusi Daerah. Satu sisi ini adalah capaian yang baik sebagai indikasi dari peningkatan layanan kesehatan oleh RSUD Provinsi. Untuk itu, keberhasilan ini harus dikembalikan lagi untuk semakin meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui sarana dan prasarana maupun peningkatan insentif tenaga kesehatan sehingga memiliki daya saing dan keunggulan.

Fraksi PKS juga mencermati ketergantungan pendapatan retribusi daerah yang sangat tinggi hanya dari retribusi layanan kesehatan, ini harus menjadi sinyal dan menimbulkan kerentanan. Sumber retribusi daerah lainnya harus ditingkatkan juga, baik retribusi jasa usaha dari pemakaian kekayaan daerah dan penjualan produksi daerah yang baru mencapai sekitar Rp 1,1 Milyar. Begitupula dari lain-lain PAD yang Sah dengan capaian realisasi hanya 86,47 persen. Hal ini terutama pada PAD Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan dan Pendapatan BLUD.

Pendapatan Asli Daerah dari bagian dividen Bank Nagari menarik pula dicermati dengan nilai realisasi mencapai Rp. 126 Milyar, namun capaiannya hanya 90,80 persen dari target. Peran Bank Nagari dalam peningkatan likuiditas, inovasi dan digitalisasi layanan, maupun perannya bagi perekonomian khususnya bagi UMKM serta pembenahan serius pada

efisiensi Belanja Operasional perlu terus memperoleh perhatian. Begitupula peran pengawasan oleh DPRD terhadap penyertaan modal pada Bank Nagari maupun BUMD-BUMD lainnya.

4. Pengelolaan SILPA dan tindak lanjut hasil pemeriksaan

Fraksi PKS juga mencermati masih besarnya SILPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp284,67 miliar. Nilai ini termasuk yang kami apresiasi yaitu dari *Earmarked DAU Tambahan THR bagi ASN Guru Daerah* sebesar Rp.101,5 milyar yang diperjuangkan Gubernur ke Pemerintah Pusat. Dana ini pun telah direalisasikan pada 2026 ini. Namun juga terdapat SILPA dari Dana Bantuan Presiden dan bantuan bencana sebesar Rp. 30 milyar. Fraksi meminta Pemerintah Provinsi telah dapat menyelesaikan penyerapan anggaran dengan mengatasi berbagai kendala teknis dan administratif, sehingga dana Banpres dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terdampak bencana.

Secara keseluruhan, Fraksi PKS berpandangan bahwa besarnya SILPA hendaknya menjadi bahan evaluasi dalam pengelolaan APBD. SILPA akan bernilai positif apabila lahir dari efisiensi belanja, sebaliknya berkinerja buruk bila disebabkan tertundanya pelaksanaan program atau rendahnya penyerapan anggaran. Karena itu, penyusunan APBD ke depannya harus semakin terukur, realistis, dan berorientasi pada percepatan pencapaian hasil pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kami juga mendorong penguatan mekanisme insentif dan pembinaan terhadap kinerja OPD dalam perencanaan dan penyerapan anggaran ini.

Saudara Gubernur, Pimpinan, Anggota DPRD dan Hadirin yang berbahagia

Setelah mencermati laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Sumatera Barat menyatakan dapat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Persetujuan tersebut diberikan dengan catatan bahwa seluruh pandangan, koreksi, dan rekomendasi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan DPRD dan wajib ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berharap pertanggungjawaban APBD ini menjadi dasar perbaikan pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus meningkatkan kualitas perencanaan, mempercepat pelaksanaan kegiatan, memperkuat pengawasan, mengoptimalkan pendapatan, dan memastikan seluruh anggaran memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Semoga Allah SWT memberikan kekuatan dan petunjuk kepada kita dalam menjalankan amanah, serta membangun Sumatera Barat yang maju, adil, sejahtera, dan diridai Allah SWT.

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
Jl. Khatib Sulaiman No 87 Padang Utara

Aqulu Qauli Hadza, Wastaqhfirullah Li Walakum Wa afwan mingkum
ASSALAMUALAIKUM, WR, WB.

Padang, Senin 20 Juli 2026

14 Safar 1448 Hijriah

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FRAKSI PKS)

DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

Drs. H. Nurfirman Wansyah, MM.,Apt
Juru Bicara

H. Irsyad Syafar, Lc.M.Ed
Ketua

Syofian Hendri, S.Pd.I.,MM
Sekretaris

PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

Disampaikan Dalam :

Rapat Kerja Pembahasan Akhir

Senin / 20 Juli 2025

Juru Bicara :

H. Nofrizon, S.Sos, MM

F - PPP/1

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yth. Saudara Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Yth. Pimpinan Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Yth. Saudara Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Pimpinan OPD dilingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Yth. Hadirin segenap undangan rapat kerja pembahasan akhir.

===

Mengawali penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, kami mengajak kepada seluruh hadirin, mari kita persembahkan puji syukur kehadirat ***Allah Subhanahu wa ta'ala***, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat bersama-sama menghadiri Rapat Kerja Pembahasan Akhir ini dalam keadaan sehat wal'afiat. Shalawat beserta salam kita kirimkan untuk Nabi besar ***Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam***, yang telah memberikan petunjuk serta bimbingan kepada kita untuk kebahagian di dunia dan akhirat melalui Al-Qur'an dan Sunnahnya.

Selanjutnya, perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi Partai Persatuan Pembangunan untuk menggunakan mimbar yang terhormat ini dalam menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025. Kesempatan ini merupakan wujud penghormatan terhadap proses demokrasi dan pelaksanaan fungsi konstitusional DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan seluruh Anggota Panitia Khusus, beserta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pemikiran dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 secara komprehensif, objektif, dan penuh semangat kebersamaan. Kami berharap seluruh ikhtiar yang telah dilakukan menjadi amal saleh di sisi *Allah Subhanahu wa ta'ala* serta menghasilkan kebijakan yang membawa manfaat untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sumatera Barat.

Pimpinan Rapat, Anggota Dewan yang kami hormati,

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 merupakan wujud pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, sekaligus instrumen evaluasi untuk memastikan bahwa penyelenggaraan program, kegiatan, dan pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-14 kali berturut-turut

dari Badan Pemeriksa Keuangan merupakan prestasi yang patut diapresiasi, namun tidak mengurangi kewajiban DPRD untuk melakukan telaah kritis terhadap kualitas kinerja, manfaat program, dan akuntabilitas penggunaan APBD bagi kesejahteraan masyarakat.

Rapat Dewan yang Terhormat,

Sebelum menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi terhadap persetujuan Rancangan Peraturan Daerah ini, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan memandang perlu menyampaikan beberapa catatan, masukan, dan penegasan sebagai bahan evaluasi serta perhatian Pemerintah Daerah. Catatan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025, sekaligus mencerminkan berbagai aspirasi dan dinamika yang berkembang di tengah masyarakat, sebagai berikut :

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mencermati bahwa target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp. 2.807.443.163.516,00, dengan realisasi sebesar Rp. 2.763.868.829.028,00 atau 98,45 persen. Meskipun capaian tersebut tergolong tinggi terhadap target yang ditetapkan, namun secara nominal masih lebih rendah dibandingkan realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 yang mencapai Rp. 2.942.563.617.866,00. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya optimalisasi sumber-sumber PAD masih perlu diperkuat agar kemampuan fiskal daerah semakin mandiri dan berkelanjutan.

   Sehubungan dengan hal tersebut, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan meminta Pemerintah Daerah untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan penerimaan PAD, khususnya dari sektor pajak daerah, melalui penyempurnaan sarana dan prasarana pelayanan perpajakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta penyederhanaan

pelayanan guna memberikan kemudahan, kepastian, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Selain itu, Pemerintah Daerah perlu menyiapkan regulasi dan kebijakan yang lebih efektif terhadap kendaraan bermotor berpelat nomor di luar Provinsi Sumatera Barat (non-BA) yang beroperasi dan memperoleh manfaat ekonomi secara tetap di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong kewajiban mutasi kendaraan ke nomor polisi BA, terutama terhadap kendaraan yang telah beralih kepemilikan melalui transaksi jual beli, sehingga potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dapat dioptimalkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, terhadap sektor retribusi daerah, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mendorong Pemerintah Daerah untuk segera melakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan menambahkan objek retribusi yang hingga saat ini belum diatur mekanisme pemungutannya, serta melakukan penyesuaian terhadap tarif retribusi yang sudah tidak lagi mencerminkan perkembangan kondisi ekonomi, biaya penyelenggaraan layanan, maupun dinamika masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah tanpa mengabaikan prinsip keadilan, kepastian hukum, kualitas pelayanan publik, serta iklim investasi yang kondusif.

2. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menilai bahwa kinerja pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan masih belum menunjukkan hasil yang optimal dan belum mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dari target penerimaan sebesar Rp.139.682.145.880,00, realisasi yang berhasil dicapai hanya sebesar Rp.126.838.893.909,00. Lebih memprihatinkan lagi, capaian tersebut seluruhnya hanya ditopang oleh dua Badan

Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu PT Bank Nagari sebesar Rp.122.188.355.229,00 dan PT Jamkrida Sumatera Barat sebesar Rp.4.650.538.680,00.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar BUMD belum mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah, meskipun telah memperoleh dukungan Pemerintah Daerah melalui penyertaan modal maupun berbagai bentuk kebijakan lainnya. Padahal, keberadaan BUMD seharusnya tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan publik, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah dan kontribusi nyata terhadap penguatan kapasitas fiskal daerah. Oleh karena itu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan meminta Pemerintah Daerah untuk memperkuat fungsi pembinaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja terhadap seluruh BUMD dan Perseroan Terbatas (PT) yang memperoleh penyertaan modal daerah. Evaluasi tersebut harus dilakukan secara objektif, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kinerja, sehingga setiap

penyertaan modal benar-benar memberikan manfaat ekonomi dan menghasilkan imbal balik yang sepadan bagi daerah.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan juga mencatat bahwa pada Tahun Anggaran 2024 terdapat tiga BUMD yang mampu memberikan dividen kepada Pemerintah Daerah, yaitu PT Bank Nagari, PT Jamkrida Sumatera Barat, dan PT Askrida. Namun pada Tahun Anggaran 2025, jumlah tersebut justru berkurang menjadi hanya dua BUMD. Penurunan ini hendaknya menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja BUMD yang belum memberikan dividen maupun yang kinerjanya belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Apabila berbagai langkah pembinaan dan evaluasi tersebut belum menghasilkan perbaikan yang signifikan, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan memandang perlu agar DPRD mempertimbangkan pelaksanaan pengawasan yang lebih

mendalam melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga penyelenggaraan BUMD benar-benar berjalan secara profesional, akuntabel, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat serta keuangan daerah.

3. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mencermati masih terdapat sisa Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 yang cukup besar, yaitu sebesar Rp.177.372.374.491,24. Salah satu penyebabnya adalah tambahan penghasilan dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi guru yang baru ditransfer oleh Pemerintah Pusat pada penghujung Tahun Anggaran 2025, sehingga tidak dapat direalisasikan pembayarannya pada tahun yang sama dan baru dapat dibayarkan pada Tahun Anggaran 2026.

   Sehubungan dengan hal tersebut, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan meminta Pemerintah Daerah agar segera menuntaskan proses pencairan hak-hak para guru sesuai

dengan ketentuan yang berlaku. Bagi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, pemenuhan hak guru bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan wujud penghormatan atas dedikasi dan pengabdian mereka dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka kesejahteraan guru harus menjadi perhatian bersama,.

Sebagaimana diungkapkan oleh Nelson Mandela, *"Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat digunakan untuk mengubah dunia".* Di balik pendidikan yang berkualitas terdapat dedikasi para guru yang setiap hari mengabdikan ilmu, tenaga, dan waktunya untuk membentuk generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berharap tidak terjadi penundaan yang berkepanjangan dalam pemenuhan hak-hak guru, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dan pengabdiannya dengan tenang dan penuh semangat.

4. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mencermati masih adanya kecenderungan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melaksanakan kegiatan dan realisasi anggaran pada Triwulan III hingga Triwulan IV Tahun Anggaran 2025. Pola pelaksanaan seperti ini mengakibatkan waktu penyelesaian pekerjaan menjadi sangat terbatas, sehingga meningkatkan risiko keterlambatan penyelesaian kegiatan, pemutusan kontrak, serta besarnya sisa anggaran yang tidak dapat direalisasikan pada akhir tahun anggaran.

   Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berpandangan bahwa kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan anggaran. Oleh karena itu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mendorong agar proses pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan kegiatan dapat dipercepat sejak awal tahun anggaran, sehingga sebagian besar pekerjaan strategis telah memasuki tahap pelaksanaan paling lambat pada Triwulan II. Dengan

demikian, pelaksanaan program dan kegiatan akan lebih efektif, memiliki waktu yang memadai untuk penyelesaian pekerjaan, serta mampu meminimalkan risiko keterlambatan, pemutusan kontrak, maupun terjadinya Silpa yang dapat mengurangi optimalisasi manfaat APBD bagi masyarakat.

5. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menegaskan bahwa setiap rupiah APBD harus memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, seluruh kebijakan pembangunan hendaknya dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel serta berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.

Pimpinan Rapat, Hadirin yang kami hormati,

Setelah mencermati secara saksama hasil pembahasan, penjelasan Pemerintah Daerah, laporan Panitia Khusus, serta berbagai masukan, pendapat, dan dinamika yang berkembang selama proses pembahasan, dengan mengucapkan ***Bismillahirrahmanirrahim***, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyatakan **menerima dan menyetujui**

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Akhirnya, semoga seluruh ikhtiar, pemikiran, dan pengabdian yang telah kita curahkan dalam setiap tahapan pembahasan senantiasa mendapat ridha ***Allah Subhanahu wa Ta'ala***, menjadi amal saleh yang bernilai ibadah, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan daerah, terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin baik, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Provinsi Sumatera Barat

wabillahi taufiq wal hidayah
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

H. SAWAL, SH., Dt. PUTIAH	**Ir. Hj. NELDASWENTI, M.Si**
KETUA	SEKRETARIS

F - PPP/15

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 7057591 – 7057593 Fax. (0751) 7059328 Padang 25133
http://www.dprd-sumbarprov.go.id

Padang, 20 Juli 2026

Nomor : 900.1.1/962/FPP-2026
Sifat : Penting
Lampiran : 5 (lima) dokumen
Hal : **Penyampaian Perda**

Kepada Yth :
Sdr. Gubernur Sumatera Barat
di-
Padang

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025 menjadi Peraturan Daerah pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat tanggal 20 Juli 2026, bersama ini kami kirimkan berkas kelengkapan Peraturan Daerah dimaksud, sebagai berikut :

1. Keputusan DPRD.
2. Nota Persetujuan Bersama.
3. Risalah Rapat Paripurna.
4. Laporan Pembahasan Badan Anggaran.
5. Pendapat Akhir Fraksi-fraksi .

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, terimakasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
KETUA,

Drs. H. MUHIDI, MM

NOTA PERSETUJUAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 120-178/GSB-2026
NOMOR : 120-2/2026

TANGGAL 20 JULI 2026

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH.

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat bertempat di Ruang Sidang Utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : MAHYELDI
   Jabatan : Gubernur Sumatera Barat
   Alamat Kantor : Jl. Sudirman Nomor 51 Padang
   dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. a. Nama : MUHIDI
      Jabatan : KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
      Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.
   b. Nama : EVI YANDRI RAJO BUDIMAN
      Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
      Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.
   c. Nama : MUHAMMAD IQRA CHISSA PUTRA
      Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
      Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang
   d. Nama : NANDA SATRIA
      Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
      Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang

   dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana tertuang pada lampiran Nota Persetujuan Bersama ini.
2. PIHAK KEDUA secara kelembagaan tidak bertanggungjawab terhadap permasalahan administrasi dan kerugian keuangan daerah dari Pelaksanaan Program dan kegiatan yang terdapat dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang pertanggungjawabannya disetujui bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025, untuk di evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Nota Persetujuan Bersama ini.

Demikian Nota Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

GUBERNUR SUMATERA BARAT	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
	Ketua,
MAHYELDI	MUHIDI
	Wakil Ketua
	EVI YANDRI RAJO BUDIMAN
	Wakil Ketua,
	MUHAMMAD IQRA CHISSA PUTRA
	Wakil Ketua,
	NANDA SATRIA

LAMPIRAN : NOTA PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

1. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

a.	Pendapatan	Rp.	6.207.996.645.654,63
b.	Belanja	Rp.	6.041.051.585.846,25
c.	Surplus/Defisit	Rp.	166.945.059.808,38
d.	Pembiayaan		
	1) Penerimaan	Rp.	117.722.983.809,12
	2) Pengeluaran	Rp.	0,00
	3) Pembiayaan Netto	Rp.	117.722.983.809,12
	4) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Rp.	284.668.043.617,50

2. Uraian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp. 60.567.337.861,37 dengan rincian sebagai berikut :

1)	Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan	Rp.	6.268.563.983.516,00
2)	Realisasi	Rp.	6.207.996.645.654,63
	Selisih	Rp.	60.567.337.861,37

b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp. 345.247.351.665,18 dengan rincian sebagai berikut :

1)	Anggaran Belanja Setelah Perubahan	Rp.	6.386.298.937.511,43
2)	Realisasi	Rp.	6.041.051.585.846,25
	Selisih	Rp.	345.247.351.665,18

c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp. (284.680.013.803,81) dengan rincian sebagai berikut :

1)	Surplus/Defisit Setelah Perubahan	Rp.	(117.734.953.995,43)
2)	Realisasi	Rp.	166.945.059.808,38
	Selisih	Rp.	(284.680.013.803,81)

d. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 11.970.186,31 dengan rincian sebagai berikut :

1)	Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	117.734.953.995,43
2)	Realisasi	Rp.	117.722.983.809,12
	Selisih	Rp.	11.970.186,31

e. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

1)	Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	0,00
2)	Realisasi	Rp.	0,00
	Selisih	Rp.	0,00

f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp. 11.970.186,31 dengan rincian sebagai berikut :

1)	Anggaran Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp.	117.734.953.995,43
2)	Realisasi	Rp.	117.722.983.809,12
	Selisih	Rp.	11.970.186,31

3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dengan rincian sebagai berikut :

a.	Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	117.734.953.995,43
b.	Penggunaan SAL sebagai penerimaan Pembiayaan Berjalan	Rp.	(117.722.983.809,12)
c.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp.	284.668.043.617,50
d.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp.	(11.970.186,31)

e.	Lain-Lain	Rp.	0,00
f.	Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	284.668.043.617,50

4. Laporan Operasional per 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut :

a.	Pendapatan LO	Rp.	6.594.712.583.990,79
b.	Beban	Rp.	5.842.576.179.824,29
c.	Surplus/Defisit Operasional	Rp.	752.136.404.166,50
d.	Surplus/Defisit Non Operasional	Rp.	(16.330.444.491,69)
e.	Pos Luar Biasa	Rp.	0,00
f.	Surplus/Defisit LO	Rp.	735.805.959.674,81

5. Neraca dengan rincian sebagai berikut :

a.	Jumlah Asset	Rp.	12.849.669.192.812,30
b.	Jumlah Kewajiban	Rp.	480.630.333.623,12
c.	Jumlah Ekuitas	Rp.	12.369.038.859.189,18

6. Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut :

a.	Arus Kas dari Aktifitas Operasi	Rp.	886.339.427.244,51
b.	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	Rp.	(719.394.367.436,13)
c.	Arus Kas dari Aktifitas Transitoris	Rp.	5.388.537,69
d.	Kenaikan/Penurunan Kas	Rp.	166.950.448.346,07
e.	Saldo Awal Kas Daerah 1 Januari 2025	Rp.	117.734.953.995,43
f.	Saldo Kas Daerah akhir 31 Desember 2025	Rp.	284.685.402.341,50

7. Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2025, sebagai berikut :

a.	Ekuitas Awal	Rp.	11.796.950.964.552,20
b.	Surplus/Defisit LO	Rp.	735.805.959.674,81
c.	Koreksi Ekuitas (Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar)	Rp.	(163.718.065.037,83)
d.	Ekuitas akhir	Rp.	12.369.038.859.189,18

GUBERNUR
SUMATERA BARAT

MAHYELDI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,

MUHIDI

Wakil Ketua

EVI YANDRI RAJO BUDIMAN

Wakil Ketua,

MUHAMMAD IQRA CHISSA PUTRA

Wakil Ketua,

NANDA SATRIA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 9/SB/2026

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANANAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Menimbang :

a. bahwa sebagai pelaksanan ketentuan Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur telah menyampaikan Nota Pengantar terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna tanggal 18 Juni 2026;
b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a diatas, telah dibahas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Kepala Daerah sesuai tahapan dan mekanisme pembahasan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomot 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6806);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025;
19. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025;
20. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025;
21. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Memperhatikan :

1. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan dalam Rapat Kerja Pembahasan Akhir Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025 Tanggal 20 Juli 2026;
2. Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025 Tanggal 20 Juli 2026.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, yang memuat :

a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Neraca;
d. Laporan Operasional;
e. Laporan Arus Kas;
f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan.

KEDUA	:	Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU beserta lampirannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Persetujuan Bersama antara Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025.
KETIGA	:	Paling lambat 3 (tiga) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 disepakati oleh Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi.
KEEMPAT	:	Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026.
KELIMA	:	Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
KEENAM	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 20 Juli 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
KETUA,

MUHIDI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD NOMOR : 9/SB/2026 TENTANG PERSETUJUAN DPRD TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

1. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	6.207.996.645.654,63
b. Belanja	Rp.	6.041.051.585.846,25
c. Surplus/Defisit	Rp.	166.945.059.808,38
d. Pembiayaan		
1) Penerimaan	Rp.	117.722.983.809,12
2) Pengeluaran	Rp.	0,00
3) Pembiayaan Netto	Rp.	117.722.983.809,12
4) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Rp.	284.668.043.617,50

2. Uraian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp. 60.567.337.861,37 dengan rincian sebagai berikut :

1) Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan	Rp.	6.268.563.983.516,00
2) Realisasi	Rp.	6.207.996.645.654,63
Selisih	Rp.	60.567.337.861,37

b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp. 345.247.351.665,18 dengan rincian sebagai berikut :

1) Anggaran Belanja Setelah Perubahan	Rp.	6.386.298.937.511,43
2) Realisasi	Rp.	6.041.051.585.846,25
Selisih	Rp.	345.247.351.665,18

c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp. (284.680.013.803,81) dengan rincian sebagai berikut :

1) Surplus/Defisit Setelah Perubahan	Rp.	(117.734.953.995,43)
2) Realisasi	Rp.	166.945.059.808,38
Selisih	Rp.	(284.680.013.803,81)

d. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 11.970.186,31 dengan rincian sebagai berikut :

1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	117.734.953.995,43
2) Realisasi	Rp.	117.722.983.809,12
Selisih	Rp.	11.970.186,31

e. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	0,00
2) Realisasi	Rp.	0,00
Selisih	Rp.	0,00

f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp. 11.970.186,31 dengan rincian sebagai berikut :

1) Anggaran Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp.	117.734.953.995,43
2) Realisasi	Rp.	117.722.983.809,12
Selisih	Rp.	11.970.186,31

3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	117.734.953.995,43
b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan Pembiayaan Berjalan	Rp.	(117.722.983.809,12)

c.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp.	284.668.043.617,50
d.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp.	(11.970.186,31)
e.	Lain-Lain	Rp.	0,00
f.	Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	284.668.043.617,50

4. Laporan Operasional per 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut :

a.	Pendapatan LO	Rp.	6.594.712.583.990,79
b.	Beban	Rp.	5.842.576.179.824,29
c.	Surplus/Defisit Operasional	Rp.	752.136.404.166,50
d.	Surplus/Defisit Non Operasional	Rp.	(16.330.444.491,69)
e.	Pos Luar Biasa	Rp.	0,00
f.	Surplus/Defisit LO	Rp.	735.805.959.674,81

5. Neraca dengan rincian sebagai berikut :

a.	Jumlah Asset	Rp.	12.849.669.192.812,30
b.	Jumlah Kewajiban	Rp.	480.630.333.623,12
c.	Jumlah Ekuitas	Rp.	12.369.038.859.189,18

6. Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut :

a.	Arus Kas dari Aktifitas Operasi	Rp.	886.339.427.244,51
b.	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	Rp.	(719.394.367.436,13)
c.	Arus Kas dari Aktifitas Transitoris	Rp.	5.388.537,69
d.	Kenaikan/Penurunan Kas	Rp.	166.950.448.346,07
e.	Saldo Awal Kas Daerah 1 Januari 2025	Rp.	117.734.953.995,43
f.	Saldo Kas Daerah akhir 31 Desember 2025	Rp.	284.685.402.341,50

7. Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2025, sebagai berikut :

a.	Ekuitas Awal	Rp.	11.796.950.964.552,20
b.	Surplus/Defisit LO	Rp.	735.805.959.674,81
c.	Koreksi Ekuitas (Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar)	Rp.	(163.718.065.037,83)
d.	Ekuitas akhir	Rp.	12.369.038.859.189,18

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KETUA,

MUNIDI

RISALAH RAPAT PARIPURNA
PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP RANPERDA
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025

Hari/Tanggal	:	Senin / 20 Juli 2026
Pukul	:	14.00 Wib
Tempat	:	Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Sumatera Barat
Acara	:	Pengambilan Keputusan Terhadap RANPERDA Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025
Pimpinan Rapat	:	Drs. H. Muhidi, MM
Pimpinan DPRD	:	Evi Yandri Rajo Budiman, S.IP Muhammad Iqra Chissa Putra, S.ST, MM Nanda Satria, S.IP
Notulis	:	Rialdi, S.IP
Jumlah Anggota	:	65 Anggota DPRD orang terdiri dari :
1. Fraksi PKS	:	10 Orang
2. Fraksi Partai Gerindra		10 Orang
3. Fraksi Partai Golkar	:	9 Orang
4. Fraksi Partai Nasdem	:	9 Orang
5. Fraksi Partai Demokrat	:	8 Orang
6. Fraksi PAN	:	8 Orang
7. Fraksi PPP	:	5 Orang
8. Fraksi PDI-P dan PKB	:	6 Orang

Hadir : Anggota DPRD yang hadir terdiri dari :

1. H. Irsyad Syafar, Lc, M.Ed
2. H. Gustami Hidayat, S.Pt, MP
3. Drs. Nurfirman Wansyah, MM, Apt
4. Rafdinal, SH, MH
5. Muhammad Yasin, STP
6. Nurna Eva Karmila
7. Verry Mulyadi, SH
8. Mario Syah Johan
9. DR. Ir. H. Indra Catri, MT Dt, Malako Nan Putiah
10. Nurkhalis Dt. Bijo Dirajo
11. Jempol
12. H. Ronny Mulyadi, SE Dt. Bungsu
13. Zulkenedi Said, S. Sos, SH, M.Si, MM, MH, M.A.P
14. Hj. Sitti Izzati Aziz
15. Hj. Zaksai Kasni, SE, MM
16. H. Lazuardi Erman, SH
17. Drh. Nela Abdika Zamri
18. Endarmy
19. Erick Hamdani, SE, DT. Ambasa
20. H. Ilson Cong, SE., MM., Dt. Mongguang
21. Asril, SE
22. H. Irwan Zuldani, SE, MM
23. Bakri Bakar, SH
24. H. Indra Dt. Rajo Lelo, SH, MM

25. Daswanto, SE
26. Lastuti Darni, S.Pd
27. Hendra Halim
28. Ridwan Dt. Tumbijo
29. Agus Syahdeman, SE
30. Ali Muda, SH
31. Hj. Yesi Endriani, SM.
32. Hj. Aida, SH
33. Sawal Dt. Putih, SH
34. Ir. Hj. Neldaswenti, M.Si
35. Wirman Dt. Pangeran Nan Putih, SH
36. Nofrizon, S.Sos, MM
37. Albert Hendra Lukman, SE.

Eksekutif : Gubernur Sumatera Barat
Plh. Sekda Prov. Sumbar
Asisten I
Asisten II
Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan
Inspektorat
BPKAD
Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Penataan Ruang
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Dinas Pangan
Dinas Perindag
Dinas Kesehatan
Dinas Koperasi dan UKM
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Dinas Pemuda dan Olahraga
Dinas Perkimtan
Dinas Sosial
Dinas Kominfotik
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
Dinas Pariwisata
Dinas ESDM
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Dinas Penelitian dan Pengembangan
Bappeda
Badan Kepegawaian Daerah
Badan Kesbangpol
Badan Pendapatan Daerah
BPSDM
Biro Perekonomian
Biro Organisasi
Biro Adpim
Biro Pemerintahan dan Otda
Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Forkopimda : Kapolda Sumbar
Pangdam XX/TIB
Kodaeral II Padang

Danlanud Sutan Syahrir Padang
Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat

BUMD : PT. Bank Nagari
PT. Jamkrida Sumbar
PT. Askrida Sumbar

Turut Hadir : A. Wartawan Media Cetak dan Elektronik
B. Sekretariat DPRD Provinsi Sumbar

JALANNYA RAPAT

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

YTH. SDR. GUBERNUR SUMATERA BARAT Buya Maheldi

Selanjutnya selamat datang Bapak Irjen Pol Jatiyo Wiyoto Abdi S.E.K., selamat mengabdi kembali di ranah Minang sebagai Kapolda baru.

YTH. Bapak Ibu FORKOPIMDA PROVINSI SUMATERA BARAT

YTH. SDR.PIMPINAN DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

YTH. SDR.SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI, ASISTEN, PIMPINAN OPD, DILINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

YTH. SDR. PIMPINAN PT. BANK NAGARI, PIMPINAN BUMD

YTH. SDR. TENAGA AHLI DPRD, REKAN-REKAN WARTAWAN DAN UNDANGAN SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

Puji syukur marilah kita panjatkankehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya,sianghariini kitadapat kembali melaksanakanRapat ParipurnaDPRD Provinsi Sumatera Barat dalam acara :

1. Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, dan
2. Penyampaian Nota Pengantar terhadap Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2026.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur, Forkopimda, Sekretaris Daerah, Pimpinan OPD, undangan dan Hadirin semua yang telah berkenan menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada siang hari ini.

Dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim" Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat pada hari ini, Senin tanggal 20Juli 2026,kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

..... (Ketokan Palu 3 Kali).

Sesuai dengan Tata Tertib, Rapat Paripurna untuk penetapan Ranperda dan APBD, dihadiri lebih dari 2/3 (dua per tiga) jumlah Anggota DPRD.

Memperhatikan kehadiran Anggota DPRD telah memenuhi kourum, maka Rapat Paripurna telah dapat kita laksanakan.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna yang kami Hormati;

Sesuai dengan agenda yang ditetapkan dalam rapat Badan Musyawarah tanggal 11 Juni 2026, pada hari ini akan dilaksanakan 2 (dua) agenda rapat paripurna, yaitu Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025 dan Penyampaian Nota Pengantar terhadap Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2026.

Berhubung belum tuntasnya penyusunan Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2026 oleh karena belum keluarnya hasil fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 yang menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2026, maka Gubernur Sumatera Barat melalui surat Nomor : 900.1.1/911/APKD/BPKAD/2026tanggal 17 Juli 2026, meminta untuk penjadwalan kembali rapat paripurna penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2026.

Dengan demikian, pada rapat paripurna hari ini, kita hanya melaksanakan 1 (satu) agenda saja, yaitu Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Sesuai dengan amanat Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa dalam rangka akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, pada rapat paripurna tanggal 18 Juni 2026 yang lalu, Gubernur Sumatera Barat telah menyampaikan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, untuk selanjutnya di bahas dan disepakati bersama dengan DPRD.

Sesuai dengan tahapan dan mekanisme pembahasan, DPRD bersama Pemerintah Daerah telah melakukan pembahasannya mulai dari pembahasan pendahuluan oleh Komisi bersama OPD dan dilanjutkan dengan pembahasan dan finalisasi oleh Badan Anggaran Bersama TAPD.

Berhubung Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan sarana evaluasi yang menyeluruh terhadap pelaksanaan APBD, maka dalam pembahasannya tidak hanya menyangkut pada realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah atau SILPA, akan tetapi juga mencakup aspek efektivitas, efisien, akuntabilitas serta capaian target kinerja program dan kegiatan yang dicapai.

Dari pembahasan yang telah dilakukan oleh Badan Anggaran Bersama TAPD terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, secara umum dapat kami sampaikan sebagai berikut :

Secara umum kinerja pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2025, telah cukup maksimal. Dalam kondisi APBD yang terkontraksi cukup dalam pasca dikeluarkannya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 serta terjadinya banjir hidrometeorologi di akhir tahun 2025 yang mengakibatkan kerusakan, kerusakan infrastruktur fisik, ekonomi, dan sosial. Realisasi pendapatan daerah masih bisa diwujudkan sebesar sembilan puluh sembilan koma nol tiga persen dan realisasi belanja juga dapat terealisasi sebesar sembilan puluh empat koma lima puluh sembilan persen. Demikian juga pada aspek akuntabilitas dan transparansinya. BPK memberikan opini WTP terhadap LKPD tahun 2025. Kedua, capaian realisasi pendapatan dan belanja dalam pelaksanaan APBD tahun 2025 tersebut tentu bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah di tengah-tengah kondisi yang tidak menguntungkan. Untuk itu kami dari DPRD Provinsi Sumatera Barat memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD tahun 2025. Yang ketiga, meskipun kinerja dalam pengelolaan APBD tahun 2025 telah cukup baik, namun masih ada beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah, baik terhadap kinerja dalam pengelolaan pendapatan maupun belanja daerah agar APBD semakin berkualitas, semakin efektif, efisien, dan memberikan kontribusi yang maksimal untuk pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat.

Untuk lebih lengkapnya, hasil pembahasan yang dilakukan oleh badan anggaran bersama TAPD terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025 termuat dalam laporan badan anggaran yang akan disampaikan nanti oleh badan anggaran pada rapat paripurna ini.

Bapak Gubenur dan Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Sebelum hasil pembahasan badan anggaran bersama TAPD terhadap Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025 dilanjutkan pada tahap pembahasan tingkat kedua dalam rapat paripurna ini, di akhir pembahasan pembicaraan tingkat pertama, fraksi-fraksi telah menyampaikan pendapat akhir fraksi-fraksinya. Dari pendapat akhir fraksi-fraksi tersebut, semua fraksi dapat menyetujui hasil pembahasan terhadap Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025 dilanjutkan pada tahap pengambilan keputusan pada rapat paripurna. Dan di samping itu, fraksi-fraksi juga memberikan catatan dan masukan yang perlu menjadi perhatian dan tindak lanjuti oleh pemerintah daerah agar kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat menjadi lebih baik. Sesuai dengan agenda pada tahap pembicaraan tingkat kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 3 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014, pada rapat paripurna ini badan anggaran akan menyampaikan laporan hasil pembahasannya terhadap Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan dan penetapan kesepakatan bersama pemerintah daerah dan DPRD. Sesuai dengan urutan kegiatan tersebut, kita minta kepada Saudara Sekretaris DPRD selaku

Sekretaris Badan Anggaran untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025. Kepada Sekwan, kami persilakan.

Sekwan naik podium dan membacakan Resume laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025...

Dari laporan hasil pembahasan terhadap Ranperda Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD 2025 yang disampaikan oleh sekwan, rekan-rekan anggota DPRD yang telah memberikan persetujuan terhadap hasil pembahasan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 yang telah dilakukan oleh badan anggaran bersama TAPD. Sesuai dengan maksud Perda Nomor 80 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang disiapkan konsep keputusan DPRD tentang persetujuan DPRD terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan konsep nota kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Untuk itu diminta kepada saudara Sekretaris DPRD untuk membacakan dua konsep itu. Kami persilakan.

Sekwan naik podium dan membacakan konsep keputusan DPRD tentang persetujuan DPRD terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan konsep nota kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD....

Kedua konsep kesepakatan bersama tentang Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sumatera Barat tahun 2025. Selanjutnya kami menanyakan apakah kedua konsep tadi kita setuju? dan semuanya sudah memberikan persetujuan. Kami informasikan Keputusan DPRD dimaksud diberi nomor, nomor 9/SB/2026 tentang persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Rapat paripurna yang kami hormati;

Dengan telah ditetapkan keputusan DPRD tentang persetujuan DPRD terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025 maka acara kita lanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan bersama Gubernur dan DPRD terhadap Perda pertanggungjawaban pelaksanaan tentang APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025.

Bapak Gubernur dan pimpinan menuju tempat yang sudah disediakan untuk penandatangan kesepakatan.

Tuan Gubernur, hadirin yang kami hormati;

Dengan telah ditandatangani nota persetujuan bersama oleh Gubernur dan pimpinan DPRD maka sesuai dengan agenda pada rapat paripurna ini acara selanjutnya adalah kata sambutan dari Gubernur Sumatera Barat. Kami persilakan.

Bapak Gubernur menyampaikan kata sambutan...

Terima kasih kami sampaikan pada Bapak Gubernur yang telah memberikan kata sambutan terhadap Ranperda Pelaksanaan APBD tahun 2025.

Bpk Gubernur, rekan-rekan yang kami hormati;

Dalam pasal 195 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ditegaskan bahwa Ranperda tentang pelaksanaan APBD yang telah disepakati bersama oleh kepala daerah dan DPRD disampaikan paling lambat tiga hari sejak disepakati kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Sehubungan dengan hal tersebut kami mengingatkan kepada pemerintah daerah untuk dapat memenuhi batasan waktu penyampaiannya kepada Menteri Dalam Negeri agar Perda tentang pertanggungjawaban APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 dapat segera dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri.

Rapat paripurna yang kami hormati;

Dengan telah disepakatinya Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 maka berakhir pulalah rapat paripurna pada hari ini. Sebelum rapat paripurna ini kami tutup, kami menyampaikan permohonan maaf kepada hadirin dan undangan semua apabila dalam pelaksanaan rapat paripurna ini terdapat hal hal yang tidak berkenan pada diri kita semuanya. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillah hirabbilalamin rapat paripurna DPRD dalam rangka penetapan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025 pada hari ini secara resmi kami tutup.

..... (ketukan palu 3 x)

Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan Rapat,	Sekretaris DPRD,	Pembuat Risalah,
Drs. H. MUHIDI, MM	**Drs. MAIFRIZON, M.Si**	**RIALDI, S.IP**